

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

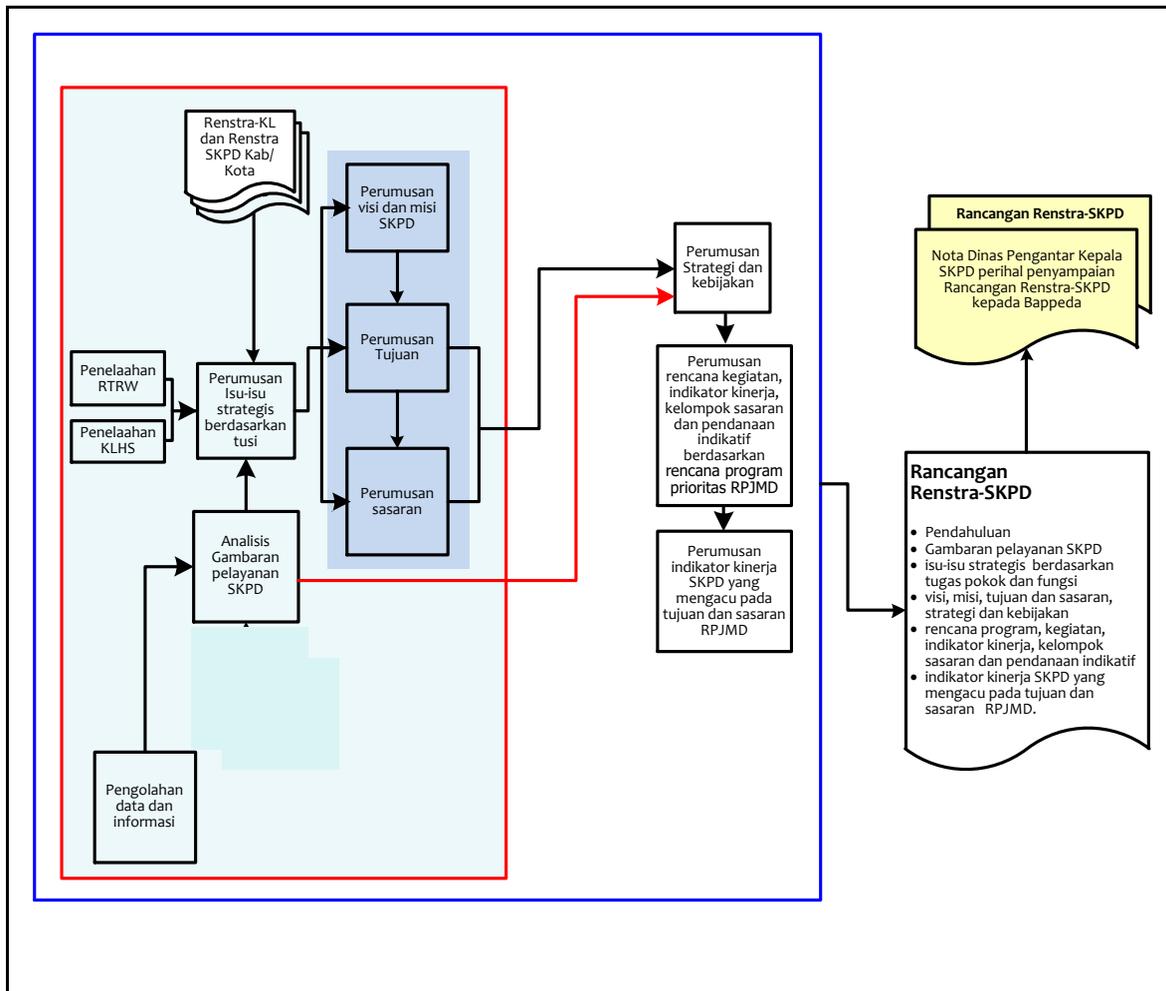
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk di implementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah di tetapkan sebelumnya.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir;
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak;
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara;
16. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
18. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
20. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Ruang;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 ;
34. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefiksi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Jangka Panjang Provinsi Jambi 2005 – 2025;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 tahun 2013 tentang tata Ruang Provinsi;

41. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan keluarga
42. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
43. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
44. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi;
45. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan berdasarkan Permendagri Nomor: 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah perangkat daerah.

Bab V Strategis dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang Strategis dan Arah Kebijakan perangkat daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Perangkat daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi. Susunan organisasi dinas adalah sebagai berikut:

- a. Kepala, melaksanakan tugas pokok Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan melaksanakan kebijakan daerah baik strategis maupun teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya;
 - d. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Gubernur;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b. Sekretariat, mempunyai tugas pokok membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaantugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dilingkungan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk Provinsi Jambi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Dinas.
- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- c. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan dinas/Dinas/kantor/lembaga teknis dan Instansi Vertikal lainnya, dan
- d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan Dinas , dengan fungsi :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan Dinas;
- c. Melaksanakan urusan kehumasan;
- d. Penyusunan Instrumen analisis jabatan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan Dinas;
- e. Pelaksanaan Pengorganisasian dan ketatalaksanaan Dinas;
- f. Melaksanakan urusan pengembangan sumber daya pegawai;
- g. Melaksanakan urusan mutasi dan kesejahteraan pegawai;
- h. Melaksanakan urusan pembinaan jabatan fungsional;
- i. Pelaksanaan penyusunan laporan barang milik daerah;
- j. Pelaksanaan urusan perjalanan Dinas; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbagian Keuangan;

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tatalaksana keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi, dengan fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan tatalaksana keuangan;
- b. Melaksanakan urusan perbendaharaan , gaji, perjalanan dinas Dinas;
- c. Melaksanakan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- d. Melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbagian Program.

Sub Bagian Program Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan, program dan anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan fungsi:

- a. Melaksanakan pengumpulan , pengolahan dan penyiapan data untuk penyusunan program Dinas;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- c. Pelaksanaan Monitoring; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang pemberdayaan Perempuan, mempunyai tugas pokok Membantu Dinas dalam rangka melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan perempuan untuk melaksanakan tugas tersebut, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi sosial budaya politik hukum dan pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik hukum dan pemerintahan;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik hukum dan pemerintahan;
- d. Pelaksanaan pemetaan urusan pemberdayaan perempuan;
- e. Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria dibidang perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan pemerintahan;
- f. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik hukum dan pemerintahan;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi perlindungan perempuan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, sosial budaya, politik hukum dan pemerintahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas pokok Membantu bidang pemberdayaan perempuan dalam rangka perlindungan perempuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi :

- b. Penyiapan Perumusan kebijakan di bidang pemberian perlindungan perempuan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberian perlindungan perempuan;
 - d. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pemberian perlindungan perempuan;
 - e. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pemberian perlindungan perempuan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian perlindungan perempuan;
 - g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberian perlindungan perempuan;
 - h. Penyusunan data perlindungan perempuan; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok Membantu bidang dalam rangka pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya.
- Fungsi:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
 - c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
 - d. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
 - e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
 - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya;
 - g. Penyusunan data bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang ekonomi, sosial dan budaya; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan, mempunyai tugas pokok Membantu bidang dalam rangka pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan, dengan fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang

- pelebagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;
 - d. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;
 - e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;
 - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan;
 - g. Penyusunan data bidang pelembagaan pengarusutamaan Gender bidang Politik Hukum dan Pemerintahan; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Bidang Perlindungan Anak, mempunyai tugas pokok Membantu Dinas dalam rangka perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di bidang perlindungan anak.
- Fungsi:
1. Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi perlindungan anak permasalahan sosial anak dan dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak.
 2. Pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi perlindungan anak permasalahan sosial anak dan dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak.
 3. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi perlindungan anak permasalahan sosial anak dan dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak.
 4. Pelaksanaan pemetaan urusan pemberdayaan perempuan
 5. Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi perlindungan anak permasalahan sosial anak dan dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak.
 6. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi perlindungan anak permasalahan sosial anak dan dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak.
 7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi perlindungan anak permasalahan sosial anak dan dan pengasuhan alternatif anak dan tumbuh kembang anak.
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Terdiri atas :
1. Seksi Perlindungan Anak, mempunyai tugas pokok Membantu bidang Perlindungan Anak dalam rangka Perlindungan Anak.
- Fungsi :
- a. Penyiapan Perumusan kebijakan di bidang pemberian Perlindungan Anak;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberian Perlindungan Anak;
 - c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pemberian Perlindungan Anak;
 - d. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pemberian Perlindungan Anak;
 - e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang

- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Fasilitasi tata wilayah desa, penaman dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang Fasilitasi tata wilayah desa, penaman dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
 - d. Pelaksanaan pemetaan urusan Fasilitasi tata wilayah desa, penaman dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
 - e. Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang Fasilitasi tata wilayah desa, penaman dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi tata wilayah desa, penaman dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
 - g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Fasilitasi tata wilayah desa, penaman dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan produk hukum desa dan dan kelurahan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. Seksi Penetaan dan Administrasi Pemerintahan Desa serta Kelurahan mempunyai tugas Melaksanakan tugas bidang dalam rangka fasilitasi penataan dan administrasi pemerintahan desa.
Fungsi :
 - a. Penyiapan Rumusan Kebijakan di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan kelurahan.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
 - c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa dan urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
 2. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa,

Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa mempunyai tugas Melaksanakan tugas bidang dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan keuangan serta aset pemerintahan desa.

Mempunyai Fungsi :

- a. Penyiapan Rumusan Kebijakan di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa.
 - c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa.
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa.
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kapasitas aparatur desa dan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan sistem informasi keuangan dan aset desa.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Kelurahan, mempunyai tugas pokok Melaksanakan tugas bidang dalam rangka pengembangan kelembagaan dan kerjasama desa dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.

Fungsi :

- a. Penyiapan Rumusan Kebijakan di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.

- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempunyai tugas pokok Membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.

Mempunyai Fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.
3. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.
4. Pelaksanaan pemetaan urusan pemberdayaan Masyarakat desa.
5. Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.
6. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.

7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan pedesaan.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pembinaan Pelayanan Sosial Dasar dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, mempunyai tugas Melaksanakan tugas bidang dalam rangka pengembangan Usaha Ekonomi Desa.

Fungsi :

- a. Penyiapan Rumusan Kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan pengelolaan kelembagaan BUM desa, pengembangan usaha BUMdesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan pengelolaan kelembagaan BUMdesa, pengembangan usaha BUMdesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa.
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan pengelolaan kelembagaan BUMdesa, pengembangan usaha BUMdesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan pengelolaan kelembagaan BUMdesa, pengembangan usaha BUMdesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa.
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat serta pembinaan pengelolaan kelembagaan BUMdesa, pengembangan usaha BUMdesa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa, mempunyai tugas Melaksanakan tugas bidang dalam rangka Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa.

Fungsi :

- a. Penyiapan Rumusan Kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, telekomunikasi desa.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, telekomunikasi desa.
 - c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, telekomunikasi desa.
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, telekomunikasi desa.
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, TTG serta pembinaan pengelolaan sarana prasarana pemukiman desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, telekomunikasi desa.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan, mempunyai tugas pokok Melaksanakan tugas bidang dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.

Fungsi :

- a. Penyiapan Rumusan Kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan

dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.

- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan perencanaan dan pembangunan partisipatif, ketahanan masyarakat desa, advokasi dan fasilitasi kemitraan masyarakat desa serta perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

g. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tugas Pokok:

Membantu dinas dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan SDA dan TTG, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan perdesaan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
- c. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Seksi Pengelolaan Kependudukan;

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka menyiapkan pembinaan, bimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi.

Fungsi:

- a. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan parameter pengendalian penduduk
- b. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang kerjasama pengendalian penduduk
- c. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang analisa dampak kependudukan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Keluarga Berencana;

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas bidang dalam rangka menyiapkan pembinaan, bimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi.

Fungsi:

- a. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta
- b. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur wilayah dan sasaran khusus.

- c. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang operasional pelayanan keluarga berencana.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Kesehatan Reproduksi.
- Tugas Pokok:
Melaksanakan tugas bidang dalam rangka menyiapkan pembinaan, bimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi.
- Fungsi:
- a. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang operasional pengaturan dan hak-hak reproduksi.
 - b. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang operasional pengaturan dan hak-hak reproduksi.
 - c. Persiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang operasional pengaturan dan hak-hak reproduksi.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki tugas Teknis Operasional/teknis penunjang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan :

- a. Pengaduan Masyarakat;
- b. Penjangkauan dan Pendampingan Kekerasan;
- c. Pengelolaan Kasus;
- d. Penampungan Sementara;

- e. Perlindungan Khusus Anak;
- f. Mediasi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang lainnya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, sebagai berikut:

1. Kepala UPTD

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional/teknis penunjang layanan perlindungan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi khusus, dan masalah lainnya, dan untuk melaksanakan tugas tersebut kepala UPTD memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
- b. Penyusunan program kerja UPTD PPA;
- c. Penetapan rencana intervensi dan terminasi pelayanan khusus;
- d. Pelaksanaan evaluasi hasil kerja UPTD PPA;
- e. Pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
- f. Pelaksanaan administrasi UPTD PPA; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas membantu mengendalikan dan mengelola tata laksana administrasi, kepegawaian, keuangan, asset, rumah tangga dan dukungan umum UPTD PPA, dan untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan ;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan asset;
- d. Pelaksanaan ketatausahaan dan pengelolaan system data, dokumentasi, pelaporan serta informasi layanan;

- e. Penyiapan dukungan umum pelayanan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pengaduan

Mempunyai tugas membantu melayani penerimaan pengaduan, identifikasi, klasifikasi terhadap kasus perempuan dan anak korban kekerasan, dan untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengaduan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penerimaan dan pencatatan pengaduan;
- b. Pengidentifikasi dan klarifikasi pengaduan;
- c. Pemantauan dan penjangkauan kasus kekerasan perempuan dan anak;
- d. Pelaksanaan pengelolaan kasus;
- e. Pengelolaan call center pengaduan;
- f. Perlindungan korban di penampungan sementara; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

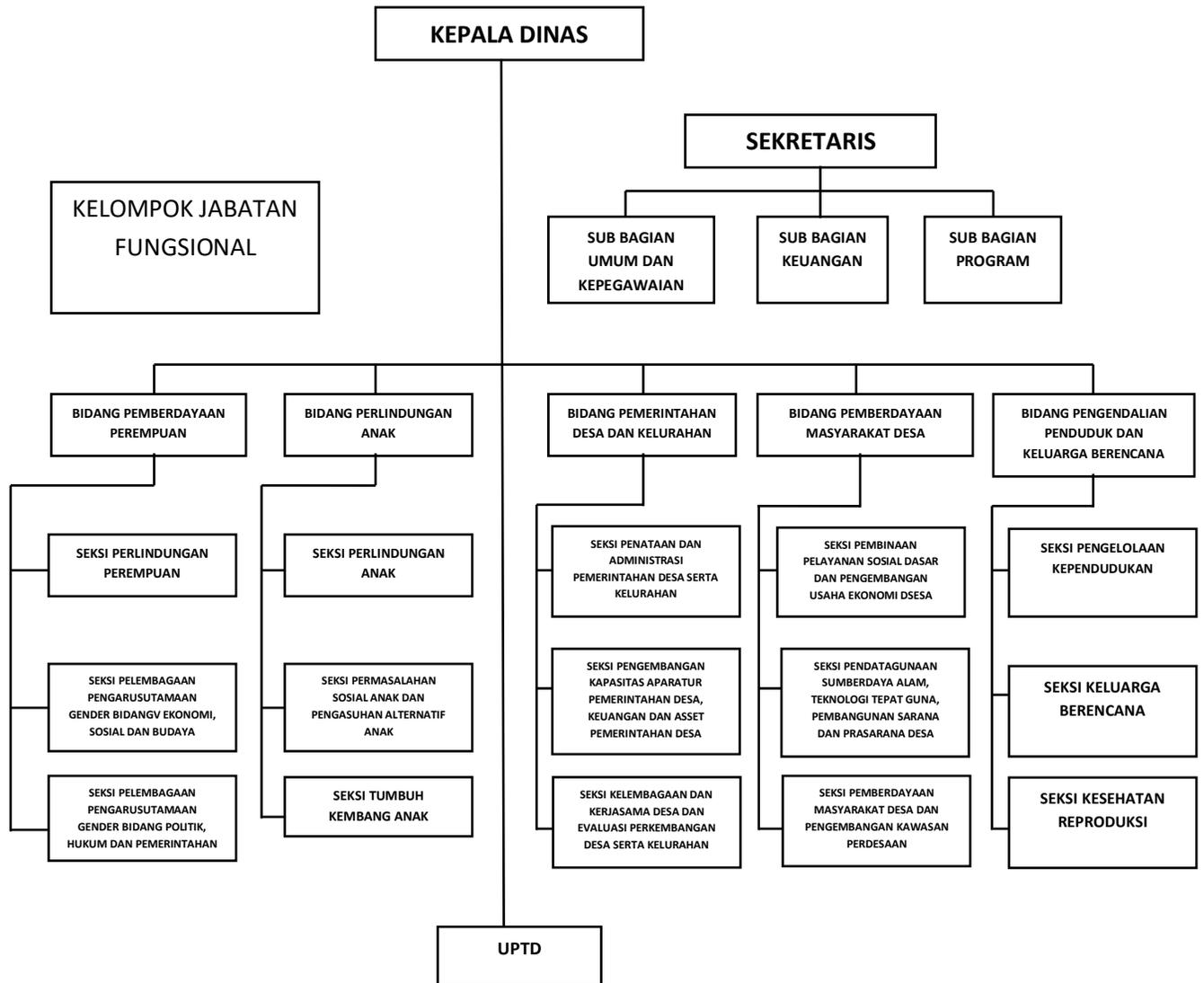
4. Seksi tindak Lanjut

Mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pelayanan terhadap kasus perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan rencana intervensi yang telah ditetapkan oleh kepala UPTD PPA, dan untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Tindak Lanjut memiliki fungsi sebagai berikut :

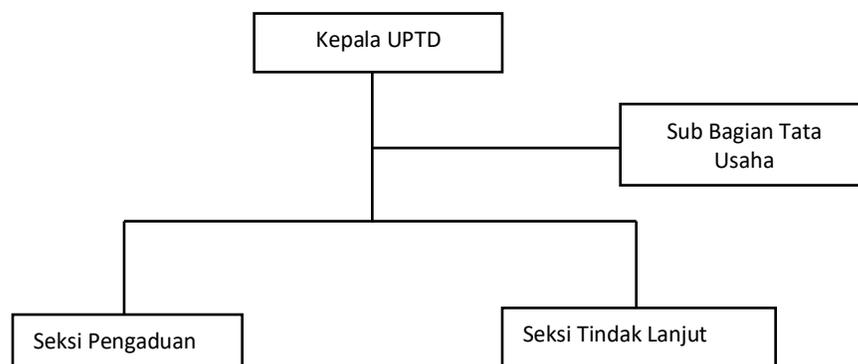
- a. Pelayanan pendamping hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendamping pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya;
- b. Pelayanan pendampingan korban dalam upaya pemulihan;
- c. Pelayanan mediasi;
- d. Penyusunan pelaporan pelayanan dan rencana terminasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

(Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DP3AP2 Provinsi Jambi)



Struktur organisasi organisasi UPTD Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi. Jumlah pegawai sebanyak 65 (enampuluh lima) orang pegawai tetap dan 12 (duabelas) orang pegawai honorer (PTT) maka jumlah pegawai pada DP3AP2 Provinsi Jambi sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	-	2	2	1	5
3	D3	-	2	-	1	3
4	S1	15	36	5	4	60
5	S2	5	4	-	-	9
6	S3	-	-	-	-	-
7	JUMLAH TOTAL					77

Sumber Data : Subbag Umum dan Kepegawaian DP3AP2 Tahun 2020

Uraian analisis kondisi pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi berdasarkan tingkat pendidikan masih kurangnya sumber daya manusia lulusan strata II (S.2) berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, sedangkan, jumlah pegawai berdasarkan golongan sudah mencukupi dikarenakan banyaknya pegawai yang bergolongan III dan di butuhkan pegawai yang bergolongan II. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini rincian pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	-	2	2
2	Golongan III	25	28	53
3	Golongan IV	5	5	10

Sumber Data : Subbag Umum dan Kepegawaian DP3AP2 Tahun 2020

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2021 terdapat 45 aset dengan kondisi rusak. Pada Tabel 2.3 menjelaskan kondisi aset DP3AP2 Provinsi Jambi pada Tahun 2020.

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2020

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Sepeda Motor	12	1	13
2	Kendaraan Roda Empat	11	-	11
3	Meja Kerja Biro Besar	2	-	2
4	Meja Kerja Biro Sedang	7	3	10
5	Meja Rapat	1	-	1
6	Meja ½ Biro	12	3	15
7	Meja Pimpinan Rapat	1	-	1
8	Meja Rapat Oval	1	-	1
9	Meja Balkon	1	-	1
10	Meja Sudut Ruang Laktasi	1	-	-
11	Meja Laktasi	2	-	2
12	Kursi Biro Sedang	6	-	6
13	Kursi ½ Biro	7	-	7
14	Meja Rapat Panjang	1	-	1
15	Kursi Rapat	8	2	10
16	Kursi Biro S Tinggi	18	-	18
17	Kursi Kerja Eselon III	4	3	7
18	Kursi Kerja Eselon IV	6	1	7
19	Komputer Pc	19	3	22
20	Laptop	7	-	7
21	Kursi Putar	13	3	16
22	Kursi Lipat	11	4	15
23	Kursi Tamu	7	-	7
24	Kursi Tunggu Tamu	2	-	2
25	Kursi Kayu Biasa	4	4	8
26	Sofa Laktasi	2	-	2
27	Kursi Ruang Tamu Kadis	1	-	1
28	Sice Tamu Ruang Kadis	1	-	1
29	Kipas Angin	10	4	14
30	Ac 1 PK	7	1	8
31	AC 2 PK	1	-	1
32	AC Portable	1	-	1
33	AC Pendingin Ruangan	2	-	2
34	Dispencer dan Galon	8	-	8
35	Dispencer	1	-	1
36	Podium	1	-	1
37	Lemari Besi	7	2	9
38	Preezer	1	-	1
39	Lemari Kaca	4	1	5
40	Lemari Arsip	10	-	10
41	Lemari	2	1	3
42	Brankas	1	-	1
43	Filling Kabinet	11	3	14
44	Laptop	9	-	9
45	Speaker Aktif	1	-	1
46	Printer Dot Matrix	2	-	2
47	Printer Inkjet Color	8	-	8
48	Printer	14	1	15
49	Unit UPS	17	1	18
50	Zice	1	2	3
51	Jam Dinding Meja	7	-	7
52	Hordeng Crey Ruang Kadis	1	-	1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
53	Hordeng Biasa Ruang Tunggu dan Ruang Tunggu Kadis	2	-	2
54	Hordeng Biasa Doble Ruang Sekdis	1	-	1
55	Hordeng Biasa R Aula	1	-	1
56	Hordeng Biasa R Lantai 1	1	-	1
57	Hordeng Biasa R Lantai 2	1	-	1
58	Tirai Ruang Laktasi	1	-	1
59	Karpet Mushola	1	-	1
60	Karpet Ruang Laktasi	1	-	1
61	Sarung Kursi Rapat	1	-	1
62	Deploy Meja Rapat	1	-	1
63	Mesin Absensi	1	-	1
64	Mesin Foto Copy	1	-	1
65	Papan Data	2	-	2
66	Papan Nama Ruang Laktasi	1	-	1
67	Printer Scanner	2	-	2
68	Note Book	3	-	3
69	Televisi	2	1	3
70	Studio System	18	-	18
71	Kamera	5	1	6
72	Infocus	2	-	2
73	Layar Proyektor	1	-	1
74	Thermogen	2	-	2
75	Telepon dan Facsmile	1	3	4

Sumber Data : Subbag Umum dan Kepegawaian DP3AP2 Tahun 2020

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara keseluruhan pencapaian kinerja pelayanan di DP3AP2 Provinsi Jambi dari tahun 2021 s.d 2026 sudah cukup baik. Akan tetapi, ada beberapa indikator kinerja yang belum bisa dicapai secara optimal karena terdapat beberapa kendala diantaranya persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman SDM baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi. Persentase desa memiliki pelayanan publik yang disebabkan karena kurangnya anggaran untuk membangun sarana dan prasarana yang menangani pelayanan publik. Persentase desa yang memiliki tata kelola pemerintahan desa yang baik yang diakibatkan oleh kurang pemahaman dari aparatur desa. Selain itu, persentase pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi yang masih cukup tinggi hal ini disebabkan masih banyaknya pasangan muda yang menikah diusia dini dan pasangan subur yang enggan dalam menggunakan alat kontrasepsi. Pencapaian kinerja pelayanan DP3AP2 Provinsi Jambi dari tahun 2016 s.d 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	NSPK Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
1.	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan				30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	27,63 %	27,63 %	27,63 %	28,58 %	12 %	92,10 %	92,10 %	92,10 %	95,26 %	40 %
2.	Persentase Penanganan Kasus Keserasan terhadap Perempuan dan Anak				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Persentase Kab/Kota Layak Anak				54,40 %	54,40 %	54,50 %	72,70 %	81,80 %	36,30 %	36,30 %	36,30 %	54,54 %	54,54 %	49,93 %	49,93 %	49,93 %	75,02 %	66,67 %
4.	Persentase BUMDesa yang terbentuk				92,99 %	92,99 %	100 %	100 %	100 %	59,04	59,04	59,04	79,54 %	86,95 %	63,49 %	63,49 %	63,49 %	79,54 %	86,95 %
5.	Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Persentase Peningkatan Kelompok Masyarakat yang Mengelola dan Memanfaatkan SDA dan TTG				6 %	6 %	6 %	20 %	20 %	30,60 %	30,60 %	30,60 %	65,03 %	65,03 %	153 %	153 %	153 %	325,15 %	325 %
7.	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan yang Mengembangkan Nilai-nilai Sosial Budaya Lokal				100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8.	Persentase Desa Cepat Berkembang				6,2 %	6,2 %	6,2%	7 %	7 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	12,22 %	12,22 %	104,84 %	104,84 %	104,84 %	174,57 %	174,57 %
9.	Total Fertility Rate (TFR)				2,23	2,23	2,23	2,21	2,21	2,23	2,23	2,23	2,31	2,31	100 %	100 %	100 %	95,67 %	95,67 %

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
Tahun 2016 – 2020

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (.000,-)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (.000,-)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		Tahun ke 2016	Tahun ke 2017	Tahun ke 2018	Tahun ke 2019	Tahun ke 2020	Tahun ke 2016	Tahun ke 2017	Tahun ke 2018	Tahun ke 2019	Tahun ke 2020	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Anggaran	Realisasi
1	Program peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																	
	Pelatihan Aparatur Pemdes dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	960.64 0.000	538.452 .250	489.252 .000	-	-	960.637 .188	537.979 .000	488.998 .400	-	-	100 %	99,91 %	99,95 %	-	-	662.781.4 17	662.538.196
	Bimtek Penyusunan Profil Desa	213.22 8.000					211.633 .600					99,25 %					213.228.0 00	211.633.600
	Pembinaan dan Perlombaan Desa	346.13 2.000	406.592 .250	301.336 .000			341.159 .214	406.542 .250	301.291 .400			98,56 %	99,99 %	99,99 %			150.283.5 00	349.664.288
	Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan				232.200 .000	68.367. 000				232.200 .000	60.579. 050				100 %	97,68 %	150.283.5 00	146.389.525
	Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat dan kelembagaan desa					15.170. 000					15.170. 000					100 %	15.170.00 0	15.170.000
	Pelatihan Aparatur Pemdes Dalam Pemdes				660.954 .500					655.267 .505					97,98 %		660.954.5 00	655.267.505
2	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan																	
	Pembinaan dan Revitalisasi Pokjanel Posyandu	87.628. 650	90.000. 000	120.183 .750	70.000. 000		87.628. 650	89.999. 950	119.934 .900	69.999. 020		100 %	99,99 %	99,79 %	99,99 %		91.953.10 0	91.890.630
	Pemberdayaan Nilai-nilai Kegotongroyongan, Adat Daerah dan Masyarakat Hukum Adat	251.83 4.750	451.799 .500	343.473 .000	275.000 .000		155.647 .750	408.024 .100	343.221 .400	275.000 .000		51,81 %	90,31 %	99,93 %	100 %		330.526.8 12,5	295.473.312 ,5
	Penguatan Kelembagaan Posyandu Lansia dan Komda Lansia	48.940. 750	61.823. 250				48.940. 750	61.783. 250				100 %	99,94 %				55.382.00 0	55.362.000
	Penguatan Kelembagaan KPA dan P4GN	98.650. 000					80.040. 750					81,14 %					98.650.00 0	80.040.750

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (.000,-)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (.000,-)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		Tahun ke 2016	Tahun ke 2017	Tahun ke 2018	Tahun ke 2019	Tahun ke 2020	Tahun ke 2016	Tahun ke 2017	Tahun ke 2018	Tahun ke 2019	Tahun ke 2020	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Anggaran	Realisasi
	Pembinaan Posyantek dan Gelar TTG	119.84 9.750	268.883 .000	180.142 .000	268.660 .000	66.346. 500	93.680. 451	255.796 .640	179.892 .000	268.660 .000	66.346. 500	78,16 %	95,13 %	99,86 %	100 %	100 %	180.776.2 50	172.875.018
	Pembinaan dan penilaian P2WKSS	192.00 0.000	126.000 .000	182.810 .000	142.320 .000		134.005 .250	125.749 .500	182.810 .000	140.645 .500		69,79 %	99,80 %	100 %	97,69 %		160.782.5 00	145.802.437
	Penguatan kapasitas Pengelolaan BumDesa	83.197. 400	137.934 .000	195.309 .750	150.000 .000	46.366. 000	71.457. 580	137.934 .000	195.304 .969	150.000 .000	46.366. 000	85,89 %	100 %	99,99 %	100 %	100 %	122.561.4 30	120.212.510
	Penguatan Pendampingan di Perdesaan	600.47 5.950	678.739 .000	298.059 .500	150.000 .000	84.399. 800	441.970 .450	578.552 .000	297.699 .500	149.700 .400	84.399. 800	73,60 %	85,24 %	99,88 %	99,65 %	100 %	362.334.8 50	310.464.430
	Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang UEP	225.00 2.600	161.751 .000	87.362. 500			190.504 .400	161.178 .000	87.349. 800			87,67 %	99,65 %	99,99 %			158.038.7 00	146.344.067
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	1.617.0 00.000	1.599.1 56.000	1.600.0 00.000	1.500.0 00.000	715.000 .000	1.347.9 52.223	1.547.4 36.264	1.592.1 49.022	1.487.8 43.283	703.306 .904	83,36 %	99,77 %	99,51 %	97,98	96,95 %	1.406.231 .200	1.335.737.5 39
	Pameran Hasil karya di Bidang Pembangunan / Jambore				60.000. 000					60.000. 000					100 %		60.000.00 0	12.000.000
	Pemberdayaan dan Penguatan Sarana dan Prasarana Pamsismas				40.000. 000					40.000. 000					100 %		40.000.00 0	40.000.000
3	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak																-	-
	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	18.460. 000	180.000 .000	59.800. 000	137.439 .000		18.431. 100	179.071 .000	58.690. 440	136.593 .600		99,84 %	99,48 %	98,14 %	99,14 %		98.924.75 0	98.196.535
	Fasilitasi Pengembangan P2TP2	240.00 0.000	239.805 .000	320.110 .000	650.000 .000		240.000 .000	239.765 .000	317.981 .100	643.499 .900		100 %	99,98 %	99,33 %	99,67 %		362.478.7 50	360.311.500
	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	76.061. 500	-	-			76.061. 500					100 %					76.061.50 0	76.061.500
	Penguatan Kelembagaan Pangarusutamaan Gender dan Anak	319.79 0.000	358.588 .000	215.815 .700	250.000 .000	77.100. 000	303.744 .000	344.366 .100	214.990 .700	249.922 .200	77.097. 200	94,98 %	96,03 %	99,62 %	99,43 %	99,99 %	244.258.7	238.024.040

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (.000,-)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (.000,-)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		Tahun ke 2016	Tahun ke 2017	Tahun ke 2018	Tahun ke 2019	Tahun ke 2020	Tahun ke 2016	Tahun ke 2017	Tahun ke 2018	Tahun ke 2019	Tahun ke 2020	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Anggaran	Realisasi
																	40	238.024.040
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi mengenai perlindungan Anak	77.945.050	180.000.000	129.880.800	112.561.000	58.150.000	77.945.050	173.112.400	129.042.200	111.532.600	58.062.000	100 %	96,17 %	99,35 %	99,43 %	99,80 %	111.707.370	109.938.850
	Pembinaan dan pengembangan Tumbuh Kembang Anak	43.252.500	70.096.000				43.230.500	70.096.000				99,95 %	100 %				56.674.250	56.663.250
	Pengembangan materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender	100.000.000					100.000.000					100 %					100.000.000	100.000.000
	Penyusunan Sistem Perlindungan bagi Perempuan	65.175.200	339.246.000				62.059.200	324.483.400				95,22 %	95,65 %				202.210.600	193.271.300
	Perlindungan perempuan terhadap Tindak kekerasan	75.500.000	60.000.000	90.342.000	90.000.000		75.440.000	60.000.000	90.148.000	89.900.900		99,92 %	100 %	99,79 %	99,99 %		78.960.500	78.872.225
	Pembinaan OPenilaian Perusahaan Pembina terbaik Temaga Kerja Perempuan, GSI dan Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan	65.791.600					65.791.600					100 %					65.791.600	65.791.600
	Pembinaan Organisasi Perempuan	350.000.000	433.754.000	488.295.000	350.000.000	217.727.700	341.291.400	432.583.400	488.115.000	348.300.100	217.638.808	97,51 %	99,73 %	99,96 %	98,99 %	99,80 %	367.955.340	365.585.742
	Evaluasi Pelaksanaan PUG		211.052.500	168.528.900	159.680.000	109.100.320		209.442.500	168.528.900	159.343.250	109.100.320		99,24 %	100 %	99,14 %	100 %	162.090.430	161.603.743
	Sosialisasi Pendidik Politik Perempuan			22.252.000	70.000.000				21.752.000	69.425.650				97,75 %	99,70 %		46.126.000	45.588.825
	Sosialisasi Pola Asuh Anak dalam keluarga dan Lingkungan			102.250.500	77.000.000				101.837.320	76.768.000				99,60 %	99,86 %		89.625.250	89.302.660

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (.000,-)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (.000,-)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		Tahun ke 2016	Tahun ke 2017	Tahun ke 2018	Tahun ke 2019	Tahun ke 2020	Tahun ke 2016	Tahun ke 2017	Tahun ke 2018	Tahun ke 2019	Tahun ke 2020	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Anggaran	Realisasi
	Pembinaan dan pengembangan kota Layaj Anak			118.207.500	173.000.000	53.975.000			117.589.160	172.932.800	53.975.000			99,48 %	98,99 %	100 %	115.060.833	114.832.320
	Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan pendampingan Korban KDRT			133.019.600	133.000.000	102.454.987			132.579.600	133.000.000	102.454.987			99,67 %	100 %	100 %	122.824.862	122.678.196
	Pelayanan dan Pendampingan Korban kekerasan					246.814.000					243.934.960					98,83 %	246.814.000	243.934.960
4	Program Pengendalian Penduduk dan KB																-	-
	Pembinaan Kampung KB			193.313.800	159.510.000				188.838.800	159.509.950				97,69 %	99,99 %		176.411.900	174.174.375
	Pemutakhiran Data Kependudukan			74.911.550						74.882.450				99,96 %			74.911.550	74.882.450
	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi pada Remaja			184.562.650	93.070.000	10.000.000			179.869.950	92.737.200	10.000.000			97,46 %	99,89 %	100 %	55.526.530	56.521.430
	Momentum HARGANAS				126.250.000				126.225.000						99,90 %		126.250.000	126.225.000
	Workshop Pendidikan Program KKBPK				121.170.000	28.688.000			121.170.000	28.688.000					100 %	100 %	74.929.000	74.929.000
	Advokasi Pengendalian penduduk dan KB					82.000.000				82.000.000					100 %		82.000.000	82.000.000

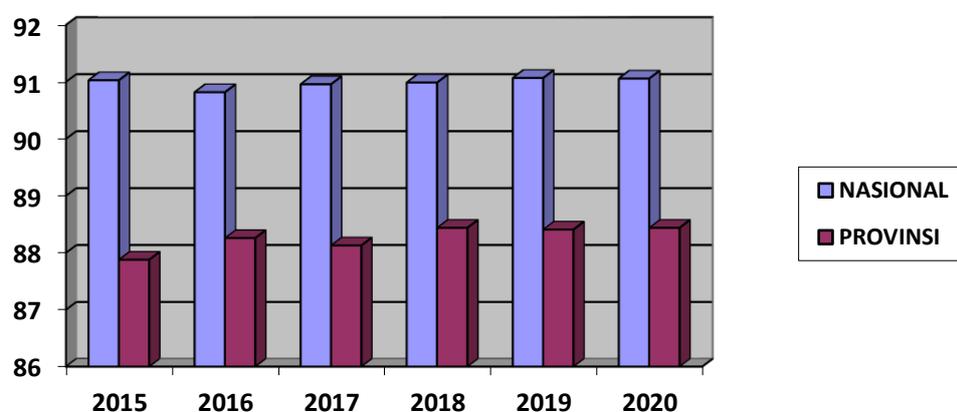
Penyerapan anggaran di DP3AP2 Provinsi Jambi sudah cukup baik. Dari tahun 2016 s.d 2020 rata-rata penyerapan anggaran melebihi 90% dari pagu anggaran yang ada. Di bawah ini merupakan gambaran anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan DP3AP2 Provinsi Jambi dari tahun 2016-2020. Meskipun dalam setiap tahunnya pagu anggaran yang diterima cenderung menurun, namun demikian, capaian target kinerja tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Dari 5 Tahun Anggaran yang dilalui, serapan anggaran pada tahun 2018 merupakan serapan anggaran tertinggi yaitu sebesar 99,67 %.

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

IPG Provinsi Jambi menunjukkan terus meningkat dari waktu ke waktu seperti terlihat pada grafik dibawah ini:



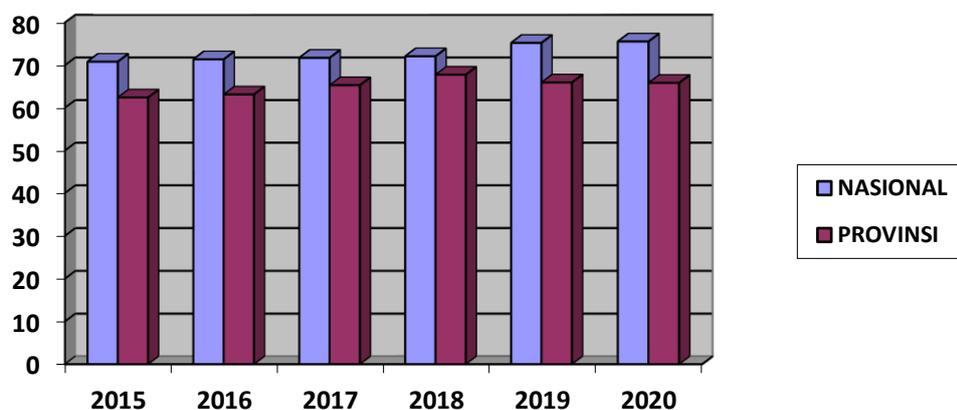
Gambar 2.2 Grafik Persandingan capaian IPG Provinsi Jambi dengan IPG Nasional

Sumber : *Badan Pusat Statistik Tahun 2020*

Dilihat capaian IPG Provinsi Jambi menunjukkan ada peningkatan dari tahun ke tahun meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Provinsi Jambi dari tahun 2015 sampai dengan 2020 juga mengalami peningkatan dan cenderung naik, dan tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 67,78. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 2.3. IDG Provinsi Jambi 2015 - 2020

Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2020.*

Rendahnya capaian IDG Provinsi Jambi masih disebabkan masih rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen dan kontribusi pendapatan domestik perempuan.

2. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Jambi

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jambi masih cukup tinggi. Tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan tersebut didominasi pelecehan atau kekerasan seksual dan penganiayaan. Selama ini banyak kasus tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan tidak dilaporkan atau dibiarkan keluarga serta warga masyarakat. Akibatnya tindak kekerasan anak dan perempuan sering berulang. Namun, belakangan ini kesadaran warga masyarakat melaporkan tindak kekerasan anak dan perempuan meningkat. Meningkatnya tindak

kekerasan terhadap anak dan perempuan di Provinsi Jambi dipengaruhi kurangnya pengawasan warga masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan anak dan perempuan di lingkungannya. Warga masyarakat di Jambi masih banyak yang kurang memperhatikan kehidupan tetangganya, sehingga tindak kekerasan anak dan perempuan di sekitar mereka sering tidak diketahui.

Pelaku tindak kekerasan di Jambi banyak dilakukan anggota keluarga terdekat. Tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan tersebut sering kurang terpantau karena warga kurang memperhatikan tetangganya. Tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan baru terungkap setelah muncul pengaduan. Tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan di Provinsi Jambi banyak terjadi di daerah pedesaan. Kecenderungan tersebut terjadi karena pengawasan terhadap tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan masih relatif kurang. Kemudian kondisi permukiman warga masyarakat di pedesaan berjauhan. Ada empat jenis kekerasan yang terjadi di Provinsi Jambi yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan penelantaran. Jenis kekerasan yang paling sering terjadi di Provinsi Jambi ialah kekerasan psikis. Pada tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 terdapat 633 Pelapor dengan berbagai kasus, dan kasus terbanyak yaitu kasus kekerasan Psikis baik terhadap perempuan maupun anak.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.

- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- i. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan pengendalian penduduk di Kampung KB;
- j. Persentasi penduduk yang tinggal di Perkotaan akan semakin meningkat terutama karena perpindahan penduduk dari desa yang beranggapan bahwa dikota akan mendapatkan pekerjaan.
- k. Pelayanan kepada masyarakat yang belum terpenuhi untuk ber-KB dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia.
- l. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Dana Desa dan Pemanfaatan Dana Desa yang tepat sasaran.
- m. Memaksimalkan Pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana Desa agar tepat sasaran oleh Tenaga Pendamping.
- n. Mewujudkan Desa Percontohan PKK di 11 Kab/Kota agar menciptakan keluarga bahagia adalah keluarga yang memenuhi 10 Program Pokok PKK.

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- g. Sudah terbentuknya beberapa Desa Kampung KB di Provinsi Jambi.
- h. Tersedianya Bantuan Dana Desa dalam program Dua Milyar Satu Kecamatan (DUMISAKE) dari Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan visi misi Gubernur Jambi.
- i. Tersedianya Pendamping Desa yang dapat mengawasi perangkat desa dalam pemanfaatan dan penggunaan dana Desa di Provinsi Jambi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DP3AP2 Provinsi Jambi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik ;
 - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah;
 - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- b. Permasalahan terkait bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
 - 1) Tingginya korban kekerasan pada anak;
 - 2) Tingginya kasus kekerasan perempuan;
 - 3) Belum optimal pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - 4) Masih kurangnya peran forum anak;
 - 5) Belum optimalnya kelembagaan PUG;
 - 6) Belum optimalnya pemenuhan hak anak di kab/kota;
 - 7) Belum optimalnya lembaga penyedia anak yang memerlukan perlindungan khusus ;
 - 8) Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan;
 - 9) Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga;
 - 10) Belum semua PD melaksanakan PPRG;
 - 11) Belum optimalnya pelaksanaan kab/kota layak anak;
 - 12) Belum optimalnya Program PATBM;
 - 13) Tingginya pekerja anak;
 - 14) belum optimalnya pemberdayaan pada disabilitas perempuan;
 - 15) belum optimalnya pemberdayaan pada lansia (potensial) perempuan;
 - 16) Belum optimalnya perempuan sebagai petugas profesional;
 - 17) Ditemukannya TPPO;
 - 18) Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam legislative.

c. Permasalahan terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

- 1) Masih banyaknya jumlah desa tertinggal di Provinsi Jambi;
- 2) Masih kurangnya pengetahuan aparat desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan rencana pembangunan desa;
- 3) Masih sedikitnya jumlah desa mandiri di Provinsi Jambi;
- 4) Masih banyak aparat desa yang belum memahami pengelolaan administrasi desa dan ditemukannya desa yang belum melakukan administrasi secara baik;
- 5) Masih sedikitnya desa yang mendirikan BUMDesa;
- 6) Kurangnya pengetahuan tenaga pendamping desa;
- 7) Belum optimalnya TTG;
- 8) Banyak desa yang belum memiliki sistem informasi (pelayanan publik) ;
- 9) Masih sedikitnya lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat yang memiliki kapasitas dalam bidang pemberdayaan desa dan Masih sedikitnya lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat;
- 10) Ditemukannya desa yang belum menerapkan SPM .

d. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk Jambi diatas rata-rata nasional;
- 2) Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (*Unmetneed*);
- 3) Tingginya angka Pernikahan perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga;
- 4) Persentase laki-laki ber-KB belum sesuai dengan angka harapan atau target nasional;
- 5) Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB
- 6) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM nasional dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi;
- 7) Angka penderita penyakit IMS/HIV/AIDS masih tinggi dan belum terdeteksi;

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut secara umum, disebabkan antara lain :

1. *Constitutional inferiority*, yaitu kelemahan-kelemahan yang ada pada diri organisasi sendiri seperti Sumber Daya Manusia yang masih memerlukan peningkatan kapasitas.
2. *Socialization defect*, yaitu kelemahan dalam penyampaian nilai-nilai dan pengetahuan yang lambat kepada sumber daya pelaku.
3. *Cultural defect*, yaitu kelemahan-kelemahan secara kultural yang ada

dalam masyarakat yang sangat menghambat dalam proses perubahan yang dilakukan melalui program-program yang diberikan.

4. *Accumulated Environment defect*, kelemahan-kelemahan yang wecara akumulasi terjadi di masyarakat, seperti tumpang tindihnya kebijakan, banyaknya peraturan yang kontra produktif, serta persepsi yang tidak kondusif yang terjadi di masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah **“Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional Di Bawah Lindungan Allah SWT ” Jambi MANTAP 2021-2026**. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan public berkualitas;
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender;

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian ketiga misi yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut:

Misi ke 1 (satu) dengan Tujuan, sebagai Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan public berkualitas, Misi ke 2 (dua) dengan tujuan Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Misi ke 3 (tiga) dengan Tujuan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Povinsi Jambi

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan; - Memantapkan Perekonomian Masyarakat - Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender belum tinggi; 2. Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan cenderung meningkat; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk melaksanakan penganggaran yang responsif gender • Pemanfaatan anggaran yang tersedia
2	<p>Tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan public berkualitas; - Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Masih banyaknya jumlah desa tertinggal di Provinsi Jamb; 4. Masih kurangnya pengetahuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan rancangan pembangunan desa; 5. Tingginya laju pertumbuhan penduduk; 6. Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmetneed) 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia di beberapa desa • Masih minimnya pelatihan aparatur desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A dan personil untuk melayani korban kekerasan • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak • Adanya kerjasama antar pemerintahan

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender	7. Masih kurangnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	<p>dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan rencana pembangunan desa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan penting ber-KB • Masih kurangnya kapabilitas lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, dan masyarakat hukum adat dalam melaksanakan fungsi dan perannya 	<p>daerah dalam peningkatan sarana dan prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah tersedianya tenaga pelatih dalam proses pengelolaan keuangan desa dan penyusunan rencana pembangunan desa. • Terbentuknya desa kampung KB • Terbentuknya lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa dan adanya masyarakat hukum adat
3	<p>Sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/ lembaga partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan; - Terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan pelayanan pada instansi / lembaga pemerintah daerah yang melayani public - Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan - Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan 			

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jambi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PPPA

a. Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPPA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatkan capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatkan capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. 		
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, 		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	terhadap perempuan termasuk TPPO	ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 		
3	a. Meningkatkan implementasi kabupaten/kot a layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait
	b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak			
		Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		kurang	perlindungan anak

b. Telaah Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Mendorong terwujudnya desa berkembang dan mandiri serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan kawasan perdesaan secara berkelanjutan;

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini yaitu

 - a. Berkembangnya status pembangunan desa, yaitu 6.444 Desa Mandiri, 59.291 Desa Berkembang dan 9.152 Desa Tertinggal
 - b. Meningkatnya status perkembangan kawasan perdesaan
 - c. Menurunnya kemiskinan di perdesaan sebesar 9,90 % Tahun 2024
2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan

Sasaran yang ingin dicapai berikut:

 - a. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), sebanyak 10.000 BumDesa Berkembang, 1.800 Bumdes Maju.
 - b. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesmas), yaitu 300 BumDes Bersama berkembang serta 200 BumDes Bersama Maju
 - c. Meningkatnya investasi di perdesaan mendukung transformasi ekonomi sebesar 2,50 % Tahun 2024
3. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal

Sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

 - a. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal

- b. Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 23,75 % Tahun 2024
 - c. Meningkatnya rata-rata IPM di daerah tertinggal sebesar 62,20 Tahun 2024
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan system pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah
Sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi
 5. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi
Sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi serta data dan informasi dalam keterpaduan rencana untuk meningkatkan daya saing, pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi sebesar 90 % Tahun 2024
 6. Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi
Sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi sebesar 90 % tahun 2024
 7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien dan terpercaya
Sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi
 - b. Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif

c. Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran dari Kementerian Dalam

Negeri Republik Indonesia melalui tujuan keenam yaitu Peningkatan Tata Kelola dan Kelembagaan Pemerintahan Dalam Negeri melalui sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan kementerian dalam negeri;
3. Meningkatnya kinerja dalam mendukung reformasi birokrasi.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;	Kurangnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik	Rendahnya kualitas SDM	Menguatnya tuntutan dalam penyelenggaraan GG
2.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan kementerian dalam negeri;	Ditemukannya desa yang belum melakukan administrasi secara baik dan adanya desa yang belum menerapkan SPM	Rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Menguatnya dukungan peningkatan kapasitas
3.	Meningkatnya kinerja dalam mendukung reformasi birokrasi.	Banyak desa yang belum memiliki sistem informasi (pelayanan publik)	Keterbatasan anggaran	Meningkatnya kebutuhan akan informasi yang transparan dan akuntabel

d. Telaah Renstra Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2019 - 2024, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2019 - 2024. Visi dan Misi Pembangunan tersebut di dukung oleh 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), BKKBN diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Agenda

Prioritas ke 5 (lima), untuk “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”, yaitu :

- 1) Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana
- 2) Pembangunan Pendidikan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
- 3) Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia sehat
- 4) Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan program Indonesia Kerja

Terkait dengan upaya pencapaian visi nasional, BKKBN memiliki visi untuk menjadi **Terwujudnya Indonesia Maju Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**”. Untuk pencapaian visi tersebut dijabarkan misi sebagai berikut:

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk yang seimbang;
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif;
3. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup;
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan masyarakat global;
5. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi.
6. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDN Aparatur

Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKKBN dalam rangka mendukung visi nasional adalah:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total / TFR yang dapat mencapai 2,1 pada tahun 2024
2. Meningkatnya angka Prevalensi pemakaian Kontrasepsi Modern / MCFR menjadi 63,41% pada Tahun 2024
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi / UnMetneed menjadi 7,4 % Tahun 2024
4. Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19) menjadi 18 per 1000 kelahiran Tahun 2024

5. Meningkatnya indeks pembangunan keluarga (iBangga) menjadi 61,00 Tahun 2024
6. Meningkatnya median usia kawin pertama (MUKP) menjadi 22,1 Tahun 2024

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Terhadap Pencapaian Sasaran Strategis BKKBN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Menurunnya Angka Kelahiran Total / TFR	Masih rendahnya sosialisasi ttg KB pada WUS	Kurangnya pengetahuan remaja/WUS kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi	Kepedulian masyarakat terhadap Kebutuhan berKB masih tinggi pernikahan diusia dibawah 20 tahun
2. Meningkatnya angka Prevalensi pemakaian Kontrasepsi Modern / MCFR	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB	Sarana dan prasarana yang belum memadai	Organisasi atau instansi terkait peduli terhadap KB
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi / UnMetneed	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB	Sarana dan prasarana yang belum memadai	Organisasi atau instansi terkait peduli terhadap KB
4. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)	pernikahan perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga	Pemahaman tentang ketakutan orangtua terhadap anak diatas 20 tahun akan jauh jodoh	Adat istiadat, kebiasaan pada masyarakat tersebut
5. Meningkatnya indeks pembangunan keluarga (iBangga)	Masih kurangnya pemahaman keluarga tentang fungsi keluarga dalam upaya pembentukan karakter keluarganya	Terjadinya pergeseran nilai di masyarakat	Struktur social dan kultur masyarakat
6. Meningkatnya median usia kawin pertama (MUKP)	Tingginta perkawinan usia muda	Adat, nilai,norma di masyarakat tentang perkawinan	Adanya regulasi tentang Perkawinan Anak

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi tidak bersinggungan dengan Rencana struktur tata ruang dan Rencana pola ruang

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi tidak bersinggungan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan pembobotan.

Kriteria yang digunakan beserta bobot masing-masing kriteria disajikan pada Tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.5
Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Belum optimalnya perlindungan, kelembagaan, keberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan	20
2	Belum optimalnya perlindungan, sarana dan pemenuhan hak anak di kab/kota	20
3	Belum optimalnya kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan	15
4	Belum optimalnya penguatan ekonomi masyarakat dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	15
5	Tingginya laju pertumbuhan penduduk	30
	Total	100

Hasil scoring masing-masing permasalahan dalam rangka penentuan isu strategis disajikan pada Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.6

Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rangking
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
1	Belum optimalnya perlindungan, kelembagaan, keberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan	5	100	5	100	5	75	5	75	5	150	500	1
2	Belum optimalnya perlindungan, sarana dan pemenuhan hak anak di kab/kota	5	100	5	100	5	75	5	75	5	150	500	2
3	Belum optimalnya kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan	5	100	5	100	3	45	5	75	5	150	470	3
4	Belum optimalnya penguatan ekonomi masyarakat dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	5	100	5	100	3	45	5	75	5	150	470	4
5	Tingginya laju	5	100	5	100	5	75	3	45	4	120	440	5

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rang-king
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
	pertumbuhan penduduk		0		0						0		
6	Belum optimalnya Program PATBM	4	80	5	100	5	75	3	45	4	120	420	
7	Ditemukannya desa yang belum melakukan administrasi secara baik	4	80	4	80	5	75	3	45	4	120	400	

Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya perlindungan, kelembagaan, keberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan;
2. Belum optimalnya perlindungan, sarana dan pemenuhan hak anak di kab/kota;
3. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan;
4. Belum optimalnya penguatan ekonomi masyarakat dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan;
5. Tingginya laju pertumbuhan penduduk.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur tinggi perkembangan pencapaian misi, oleh karena itu tujuan strategis harus memiliki indikator kinerja sebagai bahan pengukuran tingkat capaian program dan kegiatan.

Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata kelola pemerintahan Desa
Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama ini yaitu
 1. Meningkatkan penataan kelembagaan desa sesuai dengan standar;
 2. Meningkatnya kerja sama antar desa untuk peningkatan pelayanan pemerintahan desa;
 3. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa.
2. Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Desa, Pemanfaatan TTG dan Pengembangan Industri Perdesaan.
Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua ini yaitu
 1. Meningkatnya Usaha Ekonomi Desa;
 2. Meningkatnya pendayagunaan TTG untuk pengembangan potensi sumber daya desa untuk kesejahteraan masyarakat desa;
 3. Meningkatnya pengembangan kawasan perdesaan untuk percepatan pembangunan di perdesaan.
3. Meningkatnya Akses, Partisipasi, Manfaat dan Kontrol Perempuan dalam Pembangunan, Pemenuhan Hak Anak, dan Pengembangan Laju Pertumbuhan Anak, serta Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat.

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya akses, partisipasi, manfaat dan control perempuan dalam pembangunan;
2. Meningkatnya upaya pemenuhan hak anak;
3. Menurunnya angka rata-rata kelahiran per perempuan usia reproduksi
4. Meningkatnya fungsi dan peran Lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tahun 2021 - 2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Meningkatnya penataan kelembagaan desa sesuai dengan standar	Persentase Kab/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	60 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kerja sama antar desa untuk peningkatan pelayanan pemerintahan desa	Persentase peningkatan pelaksanaan kerja sama desa	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	80 %
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa	Persentase fasilitasi pengelolaan administrasi pemerintahan desa	60 %	100	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya fungsi dan peran Lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Desa, dan Masyarakat Hukum Adat	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Desa, Pemanfaatan TTG dan Pengembangan kawasan Perdesaan	Meningkatnya Usaha Ekonomi Desa	Persentase BumDes yang aktif	57,89 %	60 %	63 %	67 %	70 %	75 %
		Meningkatnya pendayagunaan TTG untuk pengembangan potensi sumber daya desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Persentase kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %
		Meningkatnya pengembangan kawasan perdesaan untuk percepatan pembangunan di perdesaan	Persentase kawasan perdesaan yang terbentuk	4 Kab	5 Kab	6 Kab	8 Kab	9 kab	10 Kab

3.	Meningkatkan akses, Partisipasi, Manfaat dan Kontrol Perempuan Dalam Pembangunan, Pemenuhan Hak Anak dan Pengendalian Laju Pertumbuhan Anak serta Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatkan akses, partisipasi, manfaat dan kontrol perempuan dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan)	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
			INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	IDG 67,78	IDG:67,78	IDG:69,02	IDG:70	IDG:73	IDG:73
		Meningkatnya upaya pemenuhan hak anak	Persentase perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang mendapat pelayanan komprehensif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Kab/Kota Layak Anak	8 Kab/Kota	8 Kab/Kota	9 Kab/Kota	10 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota
	Menurunnya angka rata-rata kelahiran per perempuan usia reproduksi		Total Fertility Rate	2,31	2,27	2,21	2,20	2,19	2,17

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program serta kegiatan. Kebijakan merupakan suatu arahan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi perangkat daerah.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan persentase penataan kelembagaan desa sesuai dengan standar;
- b. Meningkatkan persentase kerjasama antar desa untuk peningkatan pelayanan pemerintahan desa;
- c. Meningkatkan persentase fasilitasi pengelolaan administrasi pemerintahan desa;
- d. Meningkatkan persentase BumDes yang aktif;
- e. Meningkatkan persentase kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG;
- f. Meningkatkan persentase kawasan perdesaan yang terbentuk;
- g. Meningkatkan persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan;
- h. Meningkatkan persentase perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang mendapat pelayanan komprehensif;
- i. Meningkatkan persentase Kab/Kota Layak Anak
- j. Menurunkan Total Fertility Rate (TFR)
- k. Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat.

5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kompetensi aparatur desa dan kelurahan dengan fokus pada bintek penataan desa;
- b. Peningkatan fasilitasi Pemerintah Kabupaten untuk membentuk jaringan kerja sama antar desa / kelurahan
- c. Peningkatan kompetensi aparatur desadan kelurahan dengan focus pada Bintek Pengelolaan AdminstrasiPemerintahn Desa
- d. Peningkatan ekonomi masyarakat desa dengan fokus pada pengelolaan BUMDes yang aktif
- e. Peningkatan bimbingan dan pembinaan terhadap kelompok masyarakat melalui Bimtek TTG
- f. Pengembangan kawasan perdesaan
- g. Peningkatan fasilitasi kesempatan terhadap terhadap perempuan dalam pembangunan ;
- h. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak, Permasalahan Sosial dan pengasuhan Alternatif Anak menuju Kesejahteraan Anak;
- i. Penguatan kabupaten kota layak anak dengan fokus pada kabupaten kota yang sudah menginisiasi/ menuju kab/kota layak anak;
- j. Peningkatan cakupan pemakaian kontrasepsi pada pasangan usia subur.
- k. Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2021 -2026**

Visi : “maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional” JAMBI MANTAP 2026			
Misi : I			
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan ;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Meningkatnya penataan kelembagaan desa sesuai dengan standar	Meningkatkan persentase penataan kelembagaan desa sesuai dengan standar;	Peningkatan kompetensi aparatur desa dan kelurahan dengan fokus pada bintek penataan desa
	Meningkatnya kerja sama antar desa untuk peningkatan pelayanan pemerintahan desa	Meningkatkan persentase kerjasama antar desa untuk peningkatan pelayanan pemerintahan desa;	Peningkatan fasilitas Pemerintah Kabupaten untuk membentuk jaringan kerja sama antar desa / kelurahan
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa	Meningkatkan persentase fasilitasi pengelolaan administrasi pemerintahan desa	Peningkatan kompetensi aparatur desadan kelurahan dengan focus pada Bintek Pengelolaan AdminstrasiPemerintahan Desa
Misi : II			
Memantapkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Desa, Pemanfaatan TTG dan Pengembangan Industri Perdesaan	Meningkatnya Usaha Ekonomi Desa	Meningkatkan persentase BumDes yang aktif	Peningkatan ekonomi masyarakat desa dengan fokus pada pengelolaan BUMDes yang aktif
	Meningkatnya pendayagunaan TTG untuk pengembangan potensi sumber daya desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatkan persentase kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG	Peningkatan bimbingan dan pembinaan terhadap kelompok masyarakat melalui Bimtek TTG

	Meningkatnya pengembangan kawasan perdesaan untuk percepatan pembangunan di perdesaan	Meningkatkan persentase kawasan perdesaan yang terbentuk	Pengembangan kawasan perdesaan
Misi : III			
Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan akses, Partisipasi, Manfaat dan Kontrol Perempuan Dalam Pembangunan, Pemenuhan Hak Anak dan Pengendalian Laju Pertumbuhan Anak serta Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatkan akses, partisipasi, manfaat dan control perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan persentase perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang mendapat pelayanan komprehensif	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Anak, Tumbuh Kembang Anak, Permasalahan Sosial dan pengasuhan Alternatif Anak menuju Kesejahteraan Anak
	Meningkatnya upaya pemenuhan hak anak	Meningkatkan persentase Kab/Kota Layak Anak	Penguatan kabupaten kota layak anak dengan fokus pada kabupaten kota yang sudah menginisiasi/ menuju kab/kota layak anak
	Menurunnya angka rata-rata kelahiran per perempuan usia reproduksi	Menurunkan Total Fertility Rate (TFR)	Peningkatan cakupan pemakaian kontrasepsi pada pasangan usia subur
	Meningkatnya fungsi dan peran Lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat	Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
3. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

C. Program perlindungan perempuan

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan :

1. Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
2. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
3. Penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi

D. Program peningkatan kualitas keluarga

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

1. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak kewenangan provinsi.
2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak kewenangan provinsi.
3. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota

E. Program Daerah Provinsi Pengelolaan System Data Gender dan Anak

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi.

F. Program Pemenuhan Hak Anak

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

1. Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

G. Program Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
3. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah kabupaten/Kota

H. Program Penataan Desa

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

1. Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
2. Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa

I. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

1. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi
2. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

J. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

K. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan :

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama berada di Lintas

Daerah Kabupaten/Kota

L. Program Pengendalian Penduduk

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas penduduk
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk cakupan Daerah Provinsi

M. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

1. Pengembangan desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Kearifan Lokal
2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

N. Program Pemberdayaan Dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

1. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Meningkatnya penataan kelembagaan desa sesuai dengan standar		PROGRAM PENATAAN DESA	PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA	90 %	90 %	3.450	90 %	3.950	90 %	3.950	90 %	3.950	90 %	3.950	90 %	3.950	DP3AP2	10 Kab/Kota
			Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Persentase Fasilitasi dalam Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	90%	90%	3450	90%	3950	90%	3950	90%	3950	90%	3950	90%	3950	DP3AP2	
			Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam identifikasi, inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	1.150.	10 Kab/Kota	1.150.										
				Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan						1 dokumen	1.150.	1 dokumen	1.150.	1 dokumen	1.150.	1 dokumen	1.150.	DP3AP2	10 Kab/Kota
			Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah kab/kota yang difasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat yang difasilitasi	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	1.150.	10 Kab/Kota	1.150.										10 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat						1 dokumen	1.150.	1 dokumen	1.150.	1 dokumen	1.150.	1 dokumen	1.150.	DP3AP2	10 Kab/Kota
			Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa yang difasilitasi	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	1.150.	10 Kab/Kota	1.150.										10 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa						1 dokumen	1.150.	1 dokumen	1.150.	1 dokumen	1.150.	1 dokumen	1.150.	DP3AP2	10 Kab/Kota
			Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa yang diadakan	0	0	0	10 Paket	500										10 Kab/Kota
				Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa yang diadakan						10 Paket	500	10 Paket	500	10 Paket	500	10 Paket	500	DP3AP2	10 Kab/Kota

	Meningkatnya kerja sama antar desa untuk peningkatan pelayanan pemerintahan desa		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA	40 %	50 %	150	50 %	150	60 %	150	70 %	150	80 %	150	80 %	150	DP3AP2	10 Kab/Kota
			Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	40 %	50 %	1.000	60 %	1.000	70 %	1.000	80 %	1.000	80 %	1.000	80 %	1.000	DP3AP2	10 Kab/Kota
			Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kab/kota yang difasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	40 %	10 Kab/Kota	500	10 Kab/Kota	500									DP3AP2	10 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota						1 dokumen	500	DP3AP2	10 Kab/Kota						
			Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kab/kota yang difasilitasi Kerja Sama dengan Pihak Ketiga		10 Kab/Kota	500	10 Kab/Kota	500									DP3AP2	10 Kab/Kota
				jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan						1 dokumen	500	DP3AP2	10 Kab/Kota						
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	60 %	60 %	149	100 %	17.700	100 %	17.700	100 %	17.700	100 %	17.700	100 %	17.700		
				Jumlah Desa Mandiri	83 Desa	127	300	134	400	141	500	148	700	155	1000	163	1000	DP3AP2	
				Jumlah Desa Berkembang	875 Desa	849	250	807	350	767	450	731	650	694	900	659	1000	DP3AP2	
				Jumlah Desa Tertinggal	154 Desa	87	350	84	500	80	700	76	700	72	700	68	1000		
				jumlah BUMDesa/BUMDesa Berkembang	80	100	150	115	300	120	500	130	700	130	1000	130	1200	DP3AP2	
				jumlah BUMDesa/BUMDesa Maju	0	0	150	4	300	6	500	10	700	12	1000	12	1200	DP3AP2	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Kab/kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	60 %	60 %	149	100 %	17.700	100 %	17.700	100 %	17.700	100 %	17.700	100 %	17.700		
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa	Jumlah Kab/kota yang difasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa	10 Kab/Kota	0	0	10 kab/Kota	500									DP3AP2	10 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa						1 dokumen	500	DP3AP2	10 Kab/Kota						
			Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan manajemennya Pemerintahan Desa	120 Orang	0	0	300 orang	750									DP3AP2	Provinsi
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa						1 dokumen	750	DP3AP2	Provinsi						
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Kab/kota yang difasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	0	0	0	10 Kab/Kota	750										10 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan						1 dokumen	750	DP3AP2	10 Kab/Kota						
			Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan	Jumlah peserta yang mengikuti Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan	120 orang	0	0	400 Orang	650									DP3AP2	Provinsi

			Pengawasan Pembangunan Desa	dan Pengawasan Pembangunan desa																
				Jumlah Dokumen hasil Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa						1 dokumen	650	DP3AP2	Provinsi							
			Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah peserta yang mengikuti fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	120 orang	0	0	400 Orang	650										DP3AP2	Provinsi
				Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa						1 dokumen	650	DP3AP2	Provinsi							
			Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah peserta yang mengikuti fasilitas Pengelolaan Aset Desa	120 orang	0	0	400 Orang	650										DP3AP2	Provinsi
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa						1 dokumen	650	DP3AP2	Provinsi							
			Fasilitas Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah kab/kota yang difasilitasi pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0	0	0	10 Kab/Kota	500										DP3AP2	10 Kab/Kota
				Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						1 dokumen	500	DP3AP2	10 Kab/Kota							
			Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Jumlah kab/kota yang difasilitasi pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	149	11 Kab/Kota	1.000										DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan						1 dokumen	1.000	DP3AP2	11 Kab/Kota							
			Fasilitas Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah kab/kota yang difasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan yang	11 kab/Kota	0	0	11 Kab/Kota	1.000										DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan						1 dokumen	1.000	DP3AP2	11 Kab/Kota							
			Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	0	0	0	400 Orang	650										DP3AP2	Provinsi
				Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina						1 dokumen	650	DP3AP2	Provinsi							
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah peserta Anggota BPD yang ditingkatkan kualitasnya	40 Orang	0	0	400 Orang	650										DP3AP2	Provinsi
				Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD						1 dokumen	650	DP3AP2	Provinsi							
			Pembinaan Percepatan Pembangunan Desamelalui Bantuan Keuangan, BantuanPendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah peserta yang mengikuti pendampingan dalam percepatan pembangunan melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	0	0	0	690 Orang	1.600										DP3AP2	Provinsi

				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Tekni						1 dokumen	1.600	DP3AP2	Provinsi						
			Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi	0	0	0	1.399 Desa	650									DP3AP2	10 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa						1 dokumen	650	DP3AP2	10 Kab/Kota						
			Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Jumlah kab/kota yang mengikuti pembinaan dan pengawasan Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	0	0	0	10 Kab/Kota	500									DP3AP2	10 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa						1 dokumen	500	DP3AP2	10 Kab/Kota						
			Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah kab/kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	0	0	0	10 Kab/Kota	2.400									DP3AP2	10 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa						1 dokumen	2.400	DP3AP2	10 Kab/Kota						
			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah kab/kota yang difasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0	0	0	10 kab/Kota	650									DP3AP2	10 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa						1 dokumen	650	DP3AP2	10 Kab/Kota						
			Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah kepala desa yang difasilitasi dalam penyusunan laporan	0	0	0	330 Orang	750									DP3AP2	Provinsi
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa						1 dokumen	750	DP3AP2	Provinsi						
			Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	0	0	0	10 Kab/Kota	950									DP3AP2	10 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota						1 dokumen	950	DP3AP2	10 Kab/Kota						
			Fasilitasi Peran BPD	Jumlah kab/kota yang	0	0	0	10	950									DP3AP2	10

			dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	difasilitasi mengenai peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				Kab/Kota											Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					1 dokumen	950	DP3AP2	10 Kab/Kota							
			Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah kab/kota yang difasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	0	0	0	10 Kab/Kota	500								DP3AP2	10 Kab/Kota	
				Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi					1 dokumen	500	DP3AP2	10 Kab/Kota							
			Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa yang difasilitasi	0	0	0	2 Keg	500								DP3AP2	Provinsi	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa					1 dokumen	500	DP3AP2	Provinsi							
			Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah kab/kota yang difasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	0	0	0	10 Kab/Kota	500								DP3AP2	10 Kab/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota					1 dokumen	500	DP3AP2	10 Kab/Kota							
	Meningkatnya fungsi dan peran Lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	30	30	0	40	9.550	50	9.550	60	9.550	70	9.550	80	9.550		
			Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kab/kota yang ditingkatkan fungsi, tugas dan perannya dalam pelembagaan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat dan masyarakat hukum adat tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota	11 Kab/kota	11 kab/kota	0	11 kab/kota	9.550	11 kab/kota	9.550								
			Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat HukumAdat	Jumlah kab/kota yang diidentifikasi dan diinventarisasi Masyarakat Hukum Adat	0	0	0	10 kab/kota	700								DP3AP2	11 Kab/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat					1 dokumen	700	DP3AP2	11 Kab/Kota							
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	Jumlah kab/kota yang diberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	0	0	0	10 kab/kota	176								DP3AP2	11 Kab/Kota	

			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Masyarakat Desa Jumlah Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang difasilitasi	100 orang	100 org	1237	100 org	1600									DP3AP2	Provinsi
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						1 dokume n	1600	DP3AP2	Provinsi						
Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Desa, Pemanfaatan TTG dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	Meningkatnya Usaha Ekonomi Desa		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase peningkatan kualitas komunikasi publik melalui pengelolaan Opini/Aspirasi publik, penguatan kapasitas sumberdaya dan kemitraan komunikasi publik	90%	90%	90%	90%	9.550	90%	9.550	90%	9.550	90%	9.550	90%	9.550		
			Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	persentase kab/kota yang ditingkatkan fungsi, tugas dan perannya dalam pelebagaan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat dan masyarakat hukum adat tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota	57,89 %	60 %	175	63 %	1.900	67 %	1.900	70 %	1.900	75 %	1.900	75 %	1.900		
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah kab/kota yang melakukan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa yang difasilitasi (BUMDesa Expo, bimtek penegmebangan pasar Desa, rakor Pamsimas, bimtek Pengembangan usaha Desa Wisata Desa Digital dan perhutanan Sosial)	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	175	10 Kab/Kota	1.900									DP3AP2	10 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						1 dokume n	1.900	DP3AP2	10 Kab/Kota						
	Meningkatnya pendayagunaan TTG untuk pengembangan potensi sumber daya desa untuk		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase peningkatan kualitas komunikasi publik melalui pengelolaan Opini/Aspirasi publik, penguatan kapasitas sumberdaya dan kemitraan komunikasi publik	90%	90%	90%	90%	9.550	90%	9.550	90%	9.550	90%	9.550	90%	9.550		
	kesejahteraan masyarakat desa		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan	Jumlah kab/kota yang ditingkatkan fungsi, tugas dan perannya dalam pelebagaan	10 Desa	10 desa	175	100 desa	500	100 desa	500	100 desa	500	100 desa	500	100 desa	500		

			Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat dan masyarakat hukum adat tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota																		
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pemerintah Desa yang difasilitasi dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10 Desa	10 desa	175	100 desa	500										DP3AP2	10 Kab/Kota		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						1 dokumen	500	1 dokumen	500	1 dokumen	500	1 dokumen	500		DP3AP2	10 Kab/Kota		
	Meningkatnya pengembangan kawasan perdesaan untuk percepatan pembangunan di perdesaan		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA	40 %	50 %	150	50 %	150	60 %	150	70 %	150	80 %	150	80 %	150		DP3AP2	10 Kab/Kota		
				Meningkatkan Status Perkembangan KPPN	10	10	175	20	500	30	500	40	500	50	500	60	500					
				Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	175	10 Kab/Kota	500	10 Kab/Kota	500	10 Kab/Kota	500	10 Kab/Kota	500	10 Kab/Kota	500				
				Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	175	10 Kab/Kota	500								500		DP3AP2	10 Kab/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan						10 dokumen	500		DP3AP2	10 Kab/Kota							
Meningkatkan akses, Partisipasi, Manfaat dan Kontrol Perempuan Dalam Pembangunan, Pemenuhan Hak Anak dan Pengendalian Laju Pertumbuhan Anak serta Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatkan akses, partisipasi, manfaat dan kontrol perempuan dalam pembangunan		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)	IPG 88.44	IPG:88,44	917	IPG:91,5	6.000	IPG:91,50	6.000	IPG:91,50	6.000	IPG:91,50	6.000	IPG:91,50	6.000					
			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase Lembaga Pemerintah provinsi yang melaksanakan Pengarusutamaan gender (PUG) yang harus ditingkatkan	50 %	50 %	119	60 %	600	70 %	600	80 %	600	90 %	600	100 %	600					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi tentang perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	11 kab/kota	11 Kab/Kota	119	11 Kab/Kota	150										DP3AP2	10 Kab/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi							11 dokumen	150	11 dokumen	150	11 dokumen	150	11 dokumen	150		DP3AP2	10 Kab/Kota
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	11 kab/kota	0	0	11 Kab/Kota	150										DP3AP2	10 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil						30	150	34	150	38	150	43	150		DP3AP2	SK Focal		

				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi														point OPD Lingkup Prov Jambi	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilakukan Pendampingan dan advokasi terhadap kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	11 kab/kota	0	0	11 Kab/Kota	150									DP3AP2	10 Kab/Kota
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi						150		150		150				DP3AP2	OPD Prov Jambi
			Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilakukan sosialisasi tentang kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	11 kab/kota	0	0	11 Kab/Kota	150									DP3AP2	10 Kab/Kota
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)						150		150		150				DP3AP2	Bimtek PUG PPRG
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase Partisipasi perempuan Bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	12 %	12 %	57	30 %	1.100	30 %	1.100	30 %	1.100	30 %	1.100	30 %	1.100		
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan	50 Orang	50 Orang	57	550 Orang	550									DP3AP2	Provinsi
				Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi						1 dokumen	550	DP3AP2	Provinsi						
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Jumlah Peserta Advokasi Kebijakan dan	0	0	0	550 Orang	550									DP3AP2	Provinsi

			Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan															
				Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota					11 organisasi	550									
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Pemberian penguatan dan pengembangan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	50 %														
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	0	0	0	550 Orang	300								DP3AP2	Provinsi	
				Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				1 lembaga	300	1 lembaga	300	1 lembaga	300	1 lembaga	300	1 lembaga	300	DP3AP2	Provinsi
			Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Orang	0	0	330 Orang	750								DP3AP2	Provinsi	
				Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				1 lembaga	750	1 lembaga	750	1 lembaga	750	1 lembaga	750	1 lembaga	750	DP3AP2	Provinsi
			Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilaksanakan pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	0	0	0	11 Kab/Kota	300								DP3AP2	10 Kab/Kota	

				umlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia						11 dokumen	300	DP3AP2	10 Kab/Kota						
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TPPO YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KOMPREHENSIF	100 %	100 %	50	100 %	1.125	100 %	1.125	100 %	1.125	100 %	1.125	100 %	1.125		
			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Advokasi Terhadap Para Pihak Lingkup provinsi dan lintas kab/kota yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100 %	100 %	50	100 %	300	100 %	300	100 %	300	100 %	300	100 %	300		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi dilaksanakan	11 kab/kota	11 Kab/Kota	50	11 Kab/Kota	150									DP3AP2	10 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi						11 dokumen	150	DP3AP2	10 Kab/Kota						
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilaksanakan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	11 kab/kota	0	0	11 Kab/Kota	150									DP3AP2	10 Kab/Kota
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi						11 OPD	150	DP3AP2	10 Kab/Kota						
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	Persentase pemberian layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	100 %	100 %	281	100 %	450	100 %	450	100 %	450	100 %	450	100 %	450		

			Kabupaten/Kota																DP3AP2	UPTD
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia dan dilaksanakan	1 Layanan	1 Layanan	281	1 Layana n	100											
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat						50 orang	100		DP3AP2	UPTD						
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	11 kab/kota	11 Kab/Kota	281	11 Kab/Kota	300										DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi						11 layanan	300		DP3AP2	11 Kab/Kota						
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase pengembangan dan penguatan sumber daya pengelola serta penyediaan layanan perlindungan khusus perempuan pada lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi	100 %	0	0	100 %	475	100 %	475	100 %	475	100 %	475	100 %	475			
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilaksanakan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	11 kab/kota	0	0	11 Kab/Kota	100										DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi						11 laporan	100		DP3AP2	11 Kab/Kota						
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	30 orang	0	0	30 Orang	175										DP3AP2	Provinsi
				Jumlah Sumberdaya						1	175	1	175	1	175	1	175		DP3AP2	Provinsi

				Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas						lembaga		lembaga		lembaga		lembaga			
			Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Paket Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi yang disediakan	0	0	0	1 Paket	100									DP3AP2	Provinsi
				Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik						50 org	100	DP3AP2	Provinsi						
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kab/kota yang diperkuat jejaring Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas diperkuat jejaringnya	0	0	0	11 Kab/Kota	100									DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						11 dokumen	100	DP3AP2	11 Kab/Kota						
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	INDEKS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER	0,809	0,809	0	0,85	2.625	0,85	1.325	0,85	1.325	0,85	1.525	0,85	1.525		
			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pendampingan dan advokasi dlm upaya peningkatan kualitas keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	0	11 Kab/Kota	1.225	11 Kab/Kota	1.075								
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kab/kota yang dilaksanakan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	0	0	0	11 Kab/Kota	150									DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan						11 OPD	150	DP3AP2	11 Kab/Kota						

				Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota																
			Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	0	0	0	11 Kab/Kota	250										DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia						11 dokumen	250		DP3AP2	11 Kab/Kota						
			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dikembangkan peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi melalui kegiatan masyarakat	0	0	0	11 Kab/Kota	825										DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi						11 laporan	825		DP3AP2	11 Kab/Kota						
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi yang diperkuat dan ditingkatkan	100 %	100 %	0	100 %	1.100	100 %	950	100 %	950	100 %	950	100 %	950			
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	0	0	0	11 Kab/Kota	150										DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan						11 lembaga	150		DP3AP2	11 Kab/Kota						
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang ditingkatkan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	0	0	0	11 Kab/Kota	825										DP3AP2	11 Kab/Kota

				Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas						11 lembaga penyedia layanan	825	DP3AP2	11 Kab/Kota						
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	0	0	0	22 Orang	125									DP3AP2	Provinsi
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi						1 dokumen	125	DP3AP2	Provinsi						
			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang diberikan layanan dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	0	0	0	220 KK	300	220 KK	300	220 KK	300	220 KK	300	220 KK	300		
			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang diberikan layanan dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	0	0	0	220 KK	300									DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1 sistem layanan komprehensif	300	DP3AP2	11 Kab/Kota						
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PERSENTASE PENGELOLAAN DATA GENDER DAN ANAK	0	0	0	100 %	600	100 %	200	100 %	200	100 %	200	100 %	200		
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen data gender dan anak	0	0	0	1 Dokumen	600	1 Dokumen	200								
			Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Tersedianya Data Gender dan Anak Provinsi	0	0	0	1 Dokumen	400	1 Dokumen	400	1 Dokumen	400	1 Dokumen	400	1 Dokumen	400	DP3AP2	Provinsi
			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi yang tersaji dan dimanfaatkan	0	0	0	1 Dokumen	200									DP3AP2	11 Kab/Kota

				Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi						1 Dokumen	200	DP3AP2	11 Kab/Kota						
	Meningkatnya upaya pemenuhan hak anak		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PERSENTASE KAB/KOTA LAYAK ANAK	54.55%	72.73	105	81.82	3000	81.85	3150	100	3150	100	3150	100	3150		
			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/kota yang dilakukan pembinaan lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunisa usaha kewenangan provinsi	8 Kab/Kota	8 Kab/Kota	105	11 kab/kota	700	11 kab/kota	800	11 kab/kota	850	11 kab/kota	900	11 kab/kota	950		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	105	11 Kab/Kota	350									DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha						11 organisasi	350	DP3AP2	11 Kab/Kota						
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilakukan sinkronisasi dan koordinasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	105	11 Kab/Kota	300									DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi						11 dokumen	300	DP3AP2	11 Kab/Kota						
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	11 kab/kota	11 Kab/Kota	122	11 Kab/Kota	2300	11 Kab/Kota	2300	11 Kab/Kota	2300	11 Kab/Kota	2300	11 Kab/Kota	2300		
			Penyediaan Layanan	Jumlah peserta yang mengikuti layanan peningkatan	0	0	0	150 orang	800										

			Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	kualitas hidup anak kewenangan provinsi															
				Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi					150 orang	800									
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	61	11 Kab/Kota	150									DP3AP2	Provinsi
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi					11 Dokumen	150		DP3AP2	Provinsi						
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	50 orang	50 orang	61	40 org	300									DP3AP2	Provinsi
				Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi					1 dokumen	300		DP3AP2	Provinsi						
		Ctt: sudah sesuai ->	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kab/kota yang diperkuat Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	11 kab/kota	1050									DP3AP2	Kabupaten/kota
				Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar					11 Dokumen	1050		DP3AP2	Kabupaten/kota						

				Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					en		en		en		en				
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	INDEKS PERLINDUNGAN ANAK	66.26	66.26	61	67	1950	67.62	1950	69.87	1950	70	1950	70	1950		
			Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/kota yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	61	11 Kab/Kota	500	11 Kab/Kota	500	11 Kab/Kota	500	11 Kab/Kota	500	11 Kab/Kota	500		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilakukan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	61	11 Kab/Kota	250									DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi						11 organisasi	250	DP3AP2	11 Kab/Kota						
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	0	0	0	11 Kab/Kota	250									DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi						11 Dokumen	250	DP3AP2	11 Kab/Kota						
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi yang tersedia	100%	100%	0	100%	950	100%	950	100%	950	100%	950	100%	950		
			Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Lembaga	1 lembaga	281	1 lembaga	300										
				Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan						50 org	300								
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	Jumlah kab/kota yang dilaksanakan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan	11 Kab/Kota	0	0	11 Kab/Kota	250										

			Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Khusus Kewenangan Provinsi yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan														
				Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi					11 Pelayan an	250								
			Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang memerlukan pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	11 Kab/Kota	0	0	11 Kab/Kota	150									
				Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi					11 Dokum en	150								
			Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang diperkuat Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	11 Kab/Kota	0	0	11 Kab/Kota	250									
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi					11 Dokum en	250								
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	0	100 %	700	100 %	700	100 %	700	100 %	700	100 %	700	
			Koordinasi dan	Jumlah sarana prasarana	0 Paket	0	0	1 paket	200									

			Sinkronisasi Penyediaan Sarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	layanan bagi anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi														
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus					1 Laporan	200								
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang diperkuat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	11 Kab/Kota	0	0	11 Kab/Kota	250									
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi					11 Dokumen	250								
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang diperkuat Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	0	0	0	11 Kab/Kota	250									
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi					11 Dokumen	250								
	Menurunnya angka rata-rata kelahiran per perempuan usia reproduksi		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	1,72	1,72	0	1,70	1150	1,68	5250	1,65	5250	1,62	5250	1,62	5250	
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kab/kota dalam pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	73	11 kab/kota	750	11 kab/kota	3150	11 kab/kota	3150	11 kab/kota	3150	11 kab/kota	3150	
			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah/Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	0	0	0	11 kab/kota	200									DP3AP2
				Jumlah Dokumen Hasil					11	200	11	200	11	200	11	200		DP3AP2

				Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)						Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen			Kab/Kota	
			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi yang disusun dan dimanfaatkan	0	0	0	1 Dokumen	300										DP3AP2	Provinsi
				Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi						1 Dokumen	300		DP3AP2	Provinsi						
			Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Peserta advokasi dan sosialisasi tentang GDPK	0	0	0	0	0										DP3AP2	Provinsi
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK						1 laporan	200		DP3AP2	Provinsi						
			Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Jumlah Kab/Kota yang melakukan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	73	11 kab/kota	250										DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal						11 dokumen	350	11 dokumen	350	11 dokumen	400	11 dokumen	400		DP3AP2	11 Kab/Kota
			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Materi Pembelajaran Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal yang tersedia dan dikembangkan	0	0	0	0	0										DP3AP2	Provinsi
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal						1 Modul/dokumen	300		DP3AP2	Provinsi						
			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal yang disusun dan dikembangkan	0	0	0	0	0										DP3AP2	Provinsi
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui						1 Modul/dokumen	300		DP3AP2	Provinsi						

				Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal																
			Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan sosialisasi dan advokasi tentang Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	73	0	0										DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat						11 laporan	300		DP3AP2	11 Kab/Kota						
			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Kab/Kota yang mengimplementasikan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	73	11 kab/kota	300										DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK						11 laporan	300		DP3AP2	11 Kab/Kota						
			Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan yang disusun	0	0	0	11 kab/kota	300										DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan						11 kajian	300		DP3AP2	11 Kab/Kota						
			Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah peserta yang mengikuti advokasi dan sosialisasi Pemanfaatan Kajian Dampak	0	0	0	300 org	300										DP3AP2	Provinsi

			Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan															
				Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan					1 dokumen	300	1 dokumen	300	1 dokumen	300	1 dokumen	300	DP3AP2	Provinsi	
			Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	Jumlah peserta yang mengikuti advokasi dan sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	0	0	0	300 org	300								DP3AP2	Provinsi	
				Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain					1 dokumen	300	1 dokumen	300	1 dokumen	300	1 dokumen	300	DP3AP2	Provinsi	
			Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan pencatatan dan pelaporan yang dilaksanakan	0	0	0	11 kab/kota	300								DP3AP2	11 Kab/Kota	
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan					11 laporan	300	11 laporan	300	11 laporan	300	11 laporan	300	DP3AP2	11 Kab/Kota	
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah provinsi	0	0	0	1 dokumen	400	1 dokumen	2100	1 dokumen	2100	1 dokumen	2100	2100			
			Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan yang dilaksanakan	0	0	0	11 kab/kota	200								DP3AP2	11 Kab/Kota	
				Jumlah Dokumen Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan					11 dokumen	300	11 dokumen	300	11 dokumen	300	11 dokumen	300	DP3AP2	11 Kab/Kota	
			Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Jumlah laporan/dokumen Data Kependudukan Berbasis Keluarga	0	0	0	1 dokumen	200								DP3AP2	Provinsi	

				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga						11 dokumen	300	DP3AP2	Provinsi						
			Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemetaan dokumen Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	0	0	0	11 kab/kota	200									DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga						11 dokumen	300	DP3AP2	11 Kab/Kota						
			Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	0	0	0	11 kab/kota	200									DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan						11 dokumen	300	DP3AP2	11 Kab/Kota						
			Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	0	0	0	11 kab/kota	200	11 kab/kota	300	DP3AP2	11 Kab/Kota						
			Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang disusun	0	0	0	1 dokumen	200									DP3AP2	Provinsi
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga						1 dokumen	300	DP3AP2	Provinsi						
			Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah kab/kota yang dilakukan Pemutakhiran Data Keluarga	0	0	0	11 kab/kota	200									DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga						11 dokumen	300	DP3AP2	11 Kab/Kota						
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI	60,3 %	60,3 %	73	65.44	2050	65.48	2050	65.5	2050	65.52	2050	65.52	2050		
			Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kab/kota yang mengembangkan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan	11 Kab/Kota	0	0	11 Kab/Kota	1250										

				Budaya Lokal				11 kab/kota	150									DP3AP2	11 Kab/Kota
			Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Kab/Kota yang dikembangkan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	0	0	0												
				Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal						11 laporan	150	DP3AP2	11 Kab/Kota						
			Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	0	0	0	1 Modul	150									DP3AP2	Provinsi
				Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal						1 dokumen	150	DP3AP2	Provinsi						
			Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan Kie Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan Kie Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang digunakan	0	0	0	1 paket	250									DP3AP2	Provinsi
				Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal						1 laporan	250	DP3AP2	Provinsi						
			Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	0	0	0	11 kab/kota	150									DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja						11 dokumen	150								
			Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program	0	0	0	11 kab/kota	200									DP3AP2	11 Kab/Kota

				KKBPK						11 dokumen	200	DP3AP2	11 Kab/Kota						
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)															
			Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Kab/Kota yang mengembangkan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	0	0	0	11 kab/kota	150									DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal						11 dokumen	150	DP3AP2	11 Kab/Kota						
			Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang tersedia dan dikembangkan	0	0	0	1 Modul	150									DP3AP2	Provinsi
				Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal						1 Modul/dokumen	150	DP3AP2	Provinsi						
			Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan Kie Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan Kie Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang digunakan	0	0	0	1 paket	250									DP3AP2	Provinsi
				Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal						1 laporan	250	DP3AP2	Provinsi						
			Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah Kab/ Kota yang dilaksanakan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	0	0	0	11 kab/kota	150									DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE						11 dokumen	150	DP3AP2	11 Kab/Kota						

				Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja					n		n		n		n			a	
			Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Jumlah Kab/Kota yang diperkuat Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	0	0	0	11 kab/kota	200									DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				11 dokumen	200			DP3AP2	11 Kab/Kota						
			Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kab/Kota yang dikembangkan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	0	0	0	11 kab/kota	150									DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal				11 dokumen	150			DP3AP2	11 Kab/Kota						
			Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosidan Konseling Kesehatan Reproduksi dan HakHak Reproduksi sesuai dengan Kearifan BudayaLokal	Jumlah Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan HakHak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal yang tersedia dan dikembangkan	0	0	0	1 Modul	150									DP3AP2	Provinsi
				Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal				1 Modul/dokumen	150			DP3AP2	Provinsi						
			Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah kab/kota yang dibina dlm Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	0	0	0	11 kab/kota	800									DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi				11 dokumen	800			DP3AP2	11 Kab/Kota						
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB yang diberdayakan dan ditingkatkan partisipasinya	0	0	0	11 ormas	400										
			Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan	Jumlah kab/kota yang mengembangkan Strategi Operasional dalam rangka	0	0	0	11 kab/kota	200									DP3AP2	11 Kab/Kota

			dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB															
				Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					11 dokumen	200	DP3AP2	11 Kab/Kota							
			Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB yang ditingkatkan Peran Serta dan Kerja Samanya	0	0	0	11 ormas	200								DP3AP2	11 Kab/Kota	
				Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					11 ormas	200	DP3AP2	11 Kab/Kota							
			Penguatan dan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBP	Jumlah kab/kota yang diperkuat Jejaring Kemitraan dalam Program KKBP	0	0	0	11 kab/kota	200								DP3AP2	11 Kab/Kota	
				Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)					11 organisasi	200	DP3AP2	11 Kab/Kota							
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA (iBANGGA)	51,11	51,11	73	60.32	3725	60.35	3725	60.39	3725	60.45	3725	60.45	3725		
			Pengelolaan Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0	0	0	1 dokumen	2250	1 dokumen	1650	1 dokumen	1650	1 dokumen	1650	1 dokumen	1650		
			Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kab/Kota yang menyediakan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0	0	0	11 kab/kota	150									DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					11 dokumen	150	DP3AP2	11 Kab/Kota							

			Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal	Jumlah Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal yang dikembangkan	0	0	0	1 prototyp e	200									DP3AP2	Provinsi	
				Jumlah Unit Hasil Pengembangan <i>Prototype</i> Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal						1 prototyp e	200	DP3AP2	Provinsi							
			Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kab/kota yang melakukan pembinaan pelaksanaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0	0	0	11 kab/kot a	150									DP3AP2	11 Kab/Kot a	
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						11 dokume n	150	DP3AP2	11 Kab/Kot a							
			Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	0	0	0	50 org	150									DP3AP2	Provinsi	
				Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana						50 org	150	DP3AP2	Provinsi							
			Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	0	0	0	50 org	150									DP3AP2	Provinsi	
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja						1 dokume n	150	DP3AP2	Provinsi							
			Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah kab/kota yang ditingkatkan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	0	0	0	11 kab/kot a	150									DP3AP2	11 Kab/Kot a	
				Jumlah PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)						11 organis asi	150	DP3AP2	11 Kab/Kot a							
			Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Jumlah Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan yang dikembangkan	0	0	0	1 Materi	200									DP3AP2	Provinsi	
				Jumlah PIK-R yang mengikuti Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang							1 organis asi	200	1 organis asi	200	1 organis asi	200	1 organis asi	200	DP3AP2	Provinsi

				Dibutuhkan				11 kab/kota	150									DP3AP2	11 Kab/Kota
			Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah kab/kota yg di Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Remaja (PIK-R) di Kampung KB	0	0	0	11 kab/kota	150									DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Remaja (PIKR) di Kampung KB						11 dokumen	150	DP3AP2	11 Kab/Kota						
			Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Jumlah kab/kota yang menyediakan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	0	0	0	11 kab/kota	150									DP3AP2	11 Kab/Kota
				Tersedianya Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)						11 dokumen	150	DP3AP2	11 Kab/Kota						
			Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam upaya penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	0	0	0	11 kab/kota	150									DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBanga (Indeks Pembangunan Keluarga)						11 dokumen	150	DP3AP2	11 Kab/Kota						
			Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Materi IPK yang tersedia dan dikembangkan	0	0	0	1 Materi	200									DP3AP2	Provinsi
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBanga (Indeks Pembangunan Keluarga)						1 Dokumen	200	DP3AP2	Provinsi						
			Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK	Jumlah peserta Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK	0	0	0	50 org	150									DP3AP2	Provinsi
				Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pengembangan Keluarga						1 Dokumen	150	DP3AP2	Provinsi						
			Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah kab/kota yang di Koordinasikan Evaluasi Pencapaian IPK	0	0	0	11 kab/kota	150									DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBanga (Indeks Pembangunan Keluarga)						11 dokumen	150	DP3AP2	11 Kab/Kota						
			Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah kab/kota yang dilaksanakan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	0	0	0	11 kab/kota	150									DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan						11 dokumen	150	DP3AP2	11 Kab/Kota						

				Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK																
			Penyediaan Sarana Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah kab/kota yang menyediakan Sarana Pengasuhan 1000 HPK	0	0	0	11 kab/kota	150										DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK						11 kab/kota	150		DP3AP2	11 Kab/Kota						
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi yang ditingkatkan fungsi, tugas, peran dan keikutsertaannya dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	0	0	100 %	1325	100 %	1325	100 %	1325	100 %	1325	100 %	1325			
			Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah kab/kota yang mengelola pelaksanaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	0	0	0	11 kab/kota	250										DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)						11 dokumen	250		DP3AP2	11 Kab/Kota						
			Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Keluarga yang diperkuat dan diberdayakan ekonominya	0	0	0	55 KK	275										DP3AP2	Provinsi
				Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga						1 laporn	275		DP3AP2	Provinsi						
			Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah peserta Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	0	0	0	60 org	250										DP3AP2	Provinsi
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga						1 laporn	250		DP3AP2	Provinsi						
			Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang ditingkatkan kapasitasnya	0	0	0	11 ormas	300										DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil						11	300	11	300	11	300	11	300		DP3AP2	11

				Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga						dokumen		dokumen		dokumen		dokumen			Kab/Kota	
			Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Jumlah kab/kota yang melaksanakan Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	0	0	0	11 kab/kota	250										DP3AP2	11 Kab/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB						11 dokumen	250		DP3AP2	11 Kab/Kota						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP	A	A	1.200	A	12.710	A	14.397	A	14.397	A	13.397	A	11.397		DP3AP2	Provinsi
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	146	1 Dokumen	190	1 Dokumen	190	1 Dokumen	190	1 Dokumen	190	1 Dokumen	190		DP3AP2	Provinsi
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50		DP3AP2	Provinsi
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	jumlah Dokumen RKASKPD yang dikoordinasikan dan disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10		DP3AP2	Provinsi
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dikoordinasikan dan disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10		DP3AP2	Provinsi
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang dikoordinasikan dan disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	70	1 Dokumen	70	1 Dokumen	70	1 Dokumen	70	1 Dokumen	70		DP3AP2	Provinsi
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Perubahan DPASKPD yang dikoordinasikan dan disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50		DP3AP2	Provinsi
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Periode koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan	0	12 Bulan	70	12 Bulan	70	12 Bulan	70	12 Bulan	70	12 Bulan	70		DP3AP2	Provinsi
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Periode Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	0	12 Bulan	20	12 Bulan	20	12 Bulan	20	12 Bulan	20	12 Bulan	20		DP3AP2	Provinsi
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	100	100	10.000	100 %	11.000	100 %	11.000	100 %	11.000	100 %	11.000	100 %	11.000		DP3AP2	Provinsi
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Periode Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	100	10.000	100 %	11.000	100 %	11.000	100 %	11.000	100 %	11.000	100 %	11.000		DP3AP2	Provinsi
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Periode pelaksanaan administrasi keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	0	12 Bulan	30	12 Bulan	30	12 Bulan	30	12 Bulan	30	12 Bulan	30		DP3AP2	Provinsi

			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan															
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100	100	287.5	100	385	100	385	100	385	100	385	100	385	DP3AP2	Provinsi
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Periode pelaksanaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	3.5	12 Bulan	5	DP3AP2	Provinsi								
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	Periode penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tersedia	12 Bulan	12 Bulan	119	12 Bulan	150	DP3AP2	Provinsi								
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	4 Triwulan	4 Triwulan	0	4 Triwulan	30	DP3AP2	Provinsi								
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Periode pemakaian Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	165	12 Bulan	200	DP3AP2	Provinsi								
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	100	100	412	100	630	100	630	100	630	100	630	100	630	DP3AP2	Provinsi
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Periode Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	269	12 Bulan	300	DP3AP2	Provinsi								
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Periode Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	128	12 Bulan	150	DP3AP2	Provinsi								
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Periode pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	50	DP3AP2	Provinsi								
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Periode pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Triwulan	4 Triwulan	15	4 Triwulan	80	DP3AP2	Provinsi								
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Periode pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Triwulan	4 Triwulan	0	4 Triwulan	50	DP3AP2	Provinsi								

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja daerah dapat dilihat melalui 3 (tiga) bidang yaitu 1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan 3) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Setiap bidang memiliki indikator kinerja sebagai berikut :

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan
 - a. Indeks Pembangunan Gender;
IPG Provinsi Jambi di tahun 2021 mencapai 88,44 dengan target pencapaian akhir tahun 2026 sebesar 91,50
 - b. Indeks Pemberdayaan Gender;
IDG Provinsi Jambi di tahun 2021 mencapai 67,78 dengan target pencapaian akhir tahun 2026 sebesar 73
 - c. Persentase partisipasi, perempuan dalam pembangunan
 - d. Persentase perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang mendapat pelayanan komprehensif
 - e. Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak
2. Bidang Masyarakat dan Desa
 - a. Persentase Kab/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar

- b. Persentase peningkatan pelaksanaan kerjasama desa
 - c. Persentase fasilitasi pengelolaan administrasi pemerintahan desa
 - d. Persentase Bumdes yang aktif
 - e. Persentase kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG
 - f. Persentase kawasan perdesaan yang terbentuk
3. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- a. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP);
 - b. Persentase PUS Anggota POKTAN yang ber KB (BKB, BKR, BKL);
 - c. Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR);
 - d. Angka Kelahiran Total (TFR 15 -49 Tahun);
 - e. Angka Kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 Tahun);
 - f. Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-19 Tahun).

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2021 - 2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
			Tahun 2020	Tahun ke 2021	Tahun ke 2022	Tahun ke 2023	Tahun ke 2024	Tahun ke 2025	Tahun ke 2026	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
1	Indeks Pembangunan Gender; (IPG)	NA	88,44	88,44	91,50	91,50	91,50	91,50	91,50	91,50
2	Indeks Pemberdayaan Gender; (IDG)	NA	67,78	67,78	67,78	69,02	70	73	73	73
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan komprehensif	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender	NA	0,809	0,809	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
5	Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Persentase Pemenuhan Hak Anak	% Kab/Kota	8 Kab/Kota	8 Kab/Kota	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota
7	Indeks Perlindungan Anak	NA	66,26	66,26	67	67,62	69,87	70	70	70
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
1	Persentase Kab/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	%	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
2	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Kerjasama Desa	%	40 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	80 %	80 %
3	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	%	60 %	60 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Persentase Aparatur/Pengurus Kelembagaan yang memiliki kompetensi dala Tata Kelola Pemerintahan Desa	%	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
5	Jumlah Desa Mandiri	jumlah desa	83	127	134	141	148	155	163	163

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
			Tahun 2020	Tahun ke 2021	Tahun ke 2022	Tahun ke 2023	Tahun ke 2024	Tahun ke 2025	Tahun ke 2026	
6	Jumlah Desa Berkembang	jumlah desa	875	849	807	767	731	694	659	659
7	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah Desa	154	87	84	80	76	72	68	68
8	Meningkatkan Status Perkembangan KPPN	Indeks	10	10	30	40	50	50	50	50
9	Jumlah BUMDesa/BUMDesa Berkembang	Jumlah BUMDes	80	100	115	120	130	130	130	130
10	Jumlah BUMDesa/BUMDesa Maju	Jumlah BUMDes	0	0	4	6	10	12	12	12
Pengendalian Penduduk dan KB										
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,72 %	1,72 %	1,70 %	1,68 %	1,65 %	1,62 %	1,62 %	1,62 %
2	Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana	%	60,3 %	60,3 %	65,44 %	65,48 %	65,5 %	65,52 %	65,57 %	65,57 %
3	Indeks pembangunan Keluarga	NA	51,11	51,11	60,32	60,35	60,39	60,45	60,50	60,50

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk lingkungan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 merupakan pedoman dan arahan bagi masing-masing perangkat daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026.

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2021 - 2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021 - 2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2021 -2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum di dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DINAS



Dra. LUTHRIAH

Pembina Tk.I

Nip. 19691215 198908 2 002